

Menelisik Jejak Restorasi di PTUN Medan

AKTUAL

Edisi 41 | 1 - 15 Oktober 2015



Ichsanuddin Noorsy:

Government Failure

Apa bisa kita berharap pada sistem politik yang transaksional, melahirkan suara semu, melahirkan kebijakan semu, yang akhirnya berujung pada otoritas semu?

ISSN 2337-8395



Rp. 30.000

9 772337 839509

WWW.AKTUAL.COM

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

 Dedy **081 20 53 8776**
Ranie **081 38 210 44 69**
Rhiza **081 828 0941 009**

 marketing@aktual.com
iklan@aktual.com

PENDIRI M Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latif
PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony
REDAKTUR Ferro Maulana, Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)
ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan
STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Butho, Maulana Khamal Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Muhammad Fikry Hizbullah, Novrizal Sikumbang, Nicha Muslimawati, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Leonina K Lahama, Ludyah Annisah, Eko Sumaryanto (Foto Komersial)

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis

HEAD IT DIVISION: Yudhi Astira
NETWORK: Tri Wahyudi (Hd), Rendra
SMC: Imelda, Taufik, Iqbal Maulana

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Najamuddin Arief (Makassar), Damai Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu)

DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P

HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana

HUBUNGAN INTERNASIONAL Fahad Thalib

SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji,

N. Subihantoro

MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi, Rhiza Aditya, Ranie Anggoro

ALAMAT REDAKSI

Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810
 Telp. 021 83794508 (Hunting)
 Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com
 iklan@aktual.com

aktual.com
 TERHANGAT TERPERCAYA

aktual
 MEDIA

Menengok Krisis 1998



Pembaca yang budiman, kondisi perekonomian saat ini bisa dikatakan sudah memasuki lampu hijau. Nilai Rupiah mendekati Rp15.000/USD.

Meski banyak yang mengatakan nilai tersebut belum menunjukkan bahwa negara ini belum terkena krisis toh sejarah mengatakan hampir sebagian besar krisis ekonomian selalu ditandai dengan menurunnya nilai mata uang sebuah negara.

Krisis ekonomi tahun 1998 sebenarnya memberi pelajaran banyak soal ini. Saat itu Rupiah mencapai nilai Rp17.000/USD. Dalam laporan utama, Aktual mencoba menengok ke belakang soal krisis ekonomi 1998. Ada beberapa hal dibalik krisis tersebut yang harus dipahami oleh kita.

Amat naif jika krisis multidimensi di tahun 1998 itu hanya ditaruh dalam kotak pemahaman sebagai hancurnya Orde 'Tiran' Baru. Atau sekadar jatuhnya rezim 'korup' Soeharto. Krisis tersebut harus dibaca dengan menggunakan kacamata geopolitik dan geoekonomi global yang terjadi saat itu.

Krisis multidimensi tahun 1998 itu sebenarnya adalah momentum besar kepentingan asing untuk menguasai kekayaan Indonesia. Aktual

juga berusaha memetakan beberapa aktor penting yang mendapat keuntungan dari krisis multidimensi tersebut.

Aktual juga sempat mewawancarai orang penting OJK, Muliaman Hadad. OJK adalah salah satu lembaga penting disamping Bank Indonesia untuk menjaga agar industri keuangan nasional tidak hancur akibat turunnya nilai Rupiah. Muliaman membeberkan beberapa strategi penting OJK untukantisipasi krisis ekonomi ini tidak sampai melebar.

Di rubrik hukum, Aktual juga menyajikan beberapa kasus yang semakin menghangat pada bulan ini yakni kasus PT VSI dan Kasus keterlibatan petinggi Nasdem di korupsi Bansos. Catatan aktual, kedua kasus hukum tersebut ini sangat sarat dengan muatan politik yang berhubungan dengan sebuah parpol.

Beberapa peristiwa internasional penting seperti kekerasan di al Aqsa yang melibatkan tentara Israel juga menjadi sorotan. Rupanya, ada kepentingan Israel yang ingin menyulut kemarah-marah umat Islam di dunia.

Beberapa artikel lain yang cukup hangat juga kami sajikan buat Anda nikmati di edisi kali.

Selamat membaca. 

Laporan Utama

20 Karena Indonesia Terlalu Kaya

Ini karena Indonesia terlalu kaya sumber daya alamnya, terlalu strategis letak geopolitiknya, dan potensi demografinya sangat menjanjikan untuk dijadikan pasar produk-produk negara asing.



22 Dalam Telikungan Para Pemain Migas, Tambang dan Pertanian Berskala Global

Terkait asumsi bahwa Indonesia merupakan tujuan imperialisme dan kolonialisme global karena faktor geopolitiknya, maka pola serta modus peperangan asimetris di muka bumi mutlak harus diajarkan kepada segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.



28 WAWANCARA

Ichsanuddin Noorsy: Terjadi Government Failure

Pria kelahiran Jakarta, 9 September 1958 ini selalu konsisten mengkritisi beberapa kebijakan ekonomi politik yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Kepada Aktual dia berbicara panjang lebar soal investasi, cara penanganan krisis sampai isu-isu sosial akibat dampak kesalahan kebijakan.



38 WAWANCARA

Langkah-langkah OJK Menghadapi Badai Ekonomi Global

Apa yang langkah-langkah Otoritas Jasa Keuangan menghadapi badai ekonomi global yang menghampiri Indonesia? Berikut wawancara Aktual dengan ketua OJK Muliawan D Hadad



14 POLITIK

Meneliksik Jejak Restorasi di PTUN Medan

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada wartawan, Senin (28/9) di kantornya menyatakan kemungkinan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap politisi yang beken dengan kalimat restorasi tersebut.

34 HUKUM

Salah Alamat Berbuah Kalah

Hakim tunggal Achmad Rifai memutuskan bahwa penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejagung di kantor PT VSI pada 12-14 dan 18 Agustus 2015, telah melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), atau dinyatakan tidak sah.

44 INTERNASIONAL

Provokasi Baru Israel ke Al-Aqsa

Rezim Zionis Israel membuat provokasi baru, dengan membiarkan warga Yahudi masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Jerusalem. Warga Palestina cemas, kelompok ultranasionalis Yahudi makin diberi akses untuk menguasai tempat suci itu.

48 INTERNASIONAL

Abbott, Turnbull dan Islamofobia di Australia

Perdana Menteri Australia yang baru, Malcom Turnbull, diharapkan lebih progresif dan ramah terhadap komunitas Muslim Australia. Salah satu batu ujiannya adalah melawan rasisme dan Islamofobia di Australia.

49 INTERNASIONAL

Beruang Merah Turun Gunung di Suriah

Merasa Presiden Suriah Bashar Assad terancam jatuh, Rusia akhirnya mengerahkan militernya untuk mendukung Assad, sekaligus mengamankan batu pijakan Rusia sendiri di Timur Tengah.

50 LIFE

Senandung Debu

Debu menggelar kembali konser mini yang bertajuk 'Mustafa Debu Soul Session'. Mereka tampil dengan nuansa berbeda. Kali ini, Mustafa memboyong grup alat musik terkenal Bandung Saung Angklung Udjo. Selain menyanyikan beberapa lagu, Debu juga membagi perjalanan hidup mereka yang penuh dengan lika-liku dan berkah dalam sejarah kariernya.

3	Tatap Redaksi	12	Kilas Nasional	42	Kilas Ekonomi
5	Terkini	16	Kilas Politik	52	Kilas Daerah
6	Kaki Hari	36	Kilas Hukum	54	Oase

Mengapa Ada Penolakan Kretek sebagai Warisan Budaya?



Budayawan Mohammad Sobary mengecam para wakil rakyat di DPR yang mempersoalkan kretek sebagai warisan budaya yang layak mendapatkan perlindungan undang-undang. Pasalnya, dalam pasal 37 RUU Kebudayaan menyebutkan adanya perlindungan kretek sebagai warisan budaya.

Sejumlah politisi DPR, terutama dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional mengecam hal ini. Padahal RUU itu sendiri merupakan inisiatif DPR.

Penolakan ini tentu mengundang kecurigaan adanya agenda terselubung dari kaum antitembakau. Sobary menilai, penolakan itu menunjukkan wakil rakyat itu tak paham kebudayaan. “Bagaimana paham kebudayaan kalau mereka tidak mau tahu terhadap persoalan rakyat yang terinjak-injak,” ujar Sobary di Jakarta, Senin (28/9).

Menurutnya, kretek bukan sekadar rokok. Mantan wartawan ini mengutip Mark Hanusz, penulis buku Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia Clove Cigarettes. Mark tegas menyebut kretek sebagai sebuah hasil budaya dan peninggalan yang patut dilestarikan.

“Tulis Mark, kretek itu bukan rokok, bukan pula cerutu. Meski sama-sama berbahan baku tembakau, namun kretek juga mengandung bahan baku lain yang tidak dimiliki oleh rokok jenis manapun yakni cengkeh,” terangnya.

Cengkeh adalah tanaman endemik Nusantara. Bunga cengkeh sudah sejak lama jadi komoditas perdagangan penting. Cengkeh pula yang membuat Nusantara diincar dan dikuasai penjajah. Sebagai tanaman endemik bernilai ekonomi tinggi dan menjadi bagian hidup masyarakat, cengkeh turut membentuk bangunan budaya Indonesia.

Sobary mengingatkan, ada kelompok tertentu di masyarakat yang merasa paling tahu tentang persoalan rokok. Mereka ini begitu menggebu-gebu ingin mengubah hidup ratusan ribu petani tembakau yang terlibat dalam industri kretek.

“Mereka ini sok tahu. Padahal mereka yang tidak pernah mencium

bau tanah. Tak pernah ikut bergelut dengan masalah keseharian petani. Tapi dengan gampang mengatakan, petani tembakau bisa beralih ke produk pertanian lain,” kecamnya.

Dia mengingatkan, bahwa ada kepentingan asing yang kasat mata untuk menelan bisnis kretek dalam negeri yang besar. Berbeda dengan para penjajah yang langsung mencaplok lahan dan menguasainya. Kepentingan asing ini mempengaruhi aturan untuk dibuat pemerintah berdasarkan kepentingan mereka.

Celaknya, kepentingan asing itu berjalan mulus karena bantuan aparat pemerintah, dari pusat hingga ke daerah. Bahkan semangat memberangus industri kretek nasional ini didukung para profesional, para dokter, kaum aktivis, dan seniman.

“Mereka dengan penuh semangat menelan argumentasi ini tanpa mau berpikir kritis. Semua menjilat asing,” pungkasnya. /Ismed Eka Kusuma



Tolak Kudeta Militer, SBY Siap Pasang Badan

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku siap pasang badan jika terjadi kudeta militer terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

SBY mengaku sebagai orang yang terdepan mengatakan tolak kudeta militer karena hal tersebut akan mencoreng citra negara.

“Kalau ada pemikiran militer melakukan kudeta sekarang ini saya yang paling depan katakan menolak, tidak setuju,” ujarnya di Jakarta, Senin (28/9).

Menurut SBY, demokrasi yang selama ini sudah dibangun akan rusak dan tercoreng jika kudeta militer benar-benar terjadi.

“Kalau kudeta, demokrasi kita akan tercoreng,” tegasnya. /Karel Stefanus



Basis Budaya Pengembangan Teknologi dan Industri

Pembangunan dan perkembangan teknologi, baik untuk alasan kemakmuran ataupun demi mencegah dampak negatifnya, tidak bisa ditundukkan hanya pada prinsip-prinsip keteknikan atau rasio instrumental semata.

Idealnya, perkembangan ini harus ditarik ke jangkar sosio-kultural tempat dialog-dialog konsensual dilakukan. Hal ini penting karena teknologi tidak sekadar persoalan perangkat keras, melainkan juga menyangkut sistem nilai, aspek ideasional dan daya estetika-puitik dari komunitasnya. Teknologi terlalu berharga untuk diserahkan hanya kepada segelintir elite politik, komersial, dan keilmuan. Manusia Indonesia perlu dijadikan sadar akan kebudayaan. Ia secara aktif harus turut memikirkan dan merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan dalam rangka mendorong perkembangan iptek.

Apabila kita arahkan ingatan kita jauh ke belakang, lalu bergerak ke depan untuk memotret kinerja pembangunan hingga saat ini, segera muncul pertanyaan di benak kita: Apa sesungguhnya yang keliru dalam proses pembangunan di negeri ini? Kekayaan alam tidak mewariskan kemakmuran, kelimpahan penduduk tidak menjadi kekuatan pengubah, dan keanekaragaman kultural tidak mendorong semangat penggubah.

Mana pula klaim bahwa kebhinnekaan budaya merupakan aset bangsa? Selain paket-paket kultural untuk konsumsi pariwisata, tidak tampak adanya pengolahan secara kreatif untuk menjadikan modal kultural itu sebagai driving force bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.

Tidakkah ini semua menggugah kesadaran kita? Di satu sisi, kita

patut bersyukur bahwa Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya kultural yang sangat berlimpah. Namun di sisi lain, kita melihat betapa kinerja kebudayaan kita untuk memuliakannya masih sangat miskin.

Jika kata “kebudayaan” disepadankan dengan istilah “culture”, yang secara etimologis berarti “mengolah tanah”, akan semakin terbuka jendela kesadaran kita, bahwa kemiskinan yang menyelimuti kehidupan kita itu justru disebabkan oleh kemiskinan kreativitas kultural itu sendiri, yakni lemahnya daya-daya saintifik dan etos kerja untuk mengaktualisasikan potensi-potensi sumberdaya yang berlimpah itu.

Dalam konteks inilah kita memandang bahwa adopsi dan pengembangan teknologi di Indonesia, bukan saja sesuatu yang perlu melainkan juga imperatif. Teknologi telah menjadi ciri pendefinisi masyarakat masa kini. Suka atau tidak, keberadaannya telah menjadi begitu sentral dalam mempengaruhi cara hidup dan kehidupan kita. Masalahnya adalah, teknologi macam apa, bagaimana hal itu dikembangkan, untuk apa dan untuk siapa?

Perlunya Strategi Kebudayaan

Kalaupun pada saat ini kita merasa terdapat bantalan kebudayaan yang kurang kondusif ke arah perkembangan iptek, itu tidak berarti bahwa tidak ada jalan ke arah revitalisasi. Sebab kebudayaan sendiri adalah suatu proses belajar. Ia mesti bersifat dinamis dan terbuka (Peursen, 1976; Noerhadi, 1994). Terlebih lagi, ketika teknologi komunikasi memungkinkan terjadinya peningkatan relasi inter-kultural yang semakin intensif dan ekstensif,

dan tanpa dibatasi oleh hambatan-hambatan ruang dan waktu, maka horizon belajar itu semakin luas. Sehingga memungkinkan kita untuk meramu komposisi-komposisi kebudayaan umat manusia.

Upaya revitalisasi serupa itu bukan belum pernah dilakukan. Kuntowijoyo (1994), misalnya, memberi contoh adanya gerakan pembaruan budaya pada awal abad ke-20, yang dipelopori oleh kaum priyayi berpendidikan Belanda. Di tengah-tengah kebudayaan lama dan politik kebudayaan kolonial, kalangan ini mengumandangkan gerakan kemajuan, menganjurkan kebudayaan berpikir ilmiah, mengganti interpretasi-interpretasi magis dengan penjelasan yang rasional. Penjelasan lama tentang gerhana bulan, misalnya, diruntuhkan oleh argumen-argumen ilmiah.

Sementara, semangat modernisme Islam seperti ditunjukkan oleh Muhammadiyah, juga secara menggelora memaklumkan “perang” terhadap bid’ah dan khurafat. Cita-cita kemajuan dan kebudayaan rasional, kemudian tumbuh menjadi kebudayaan kritis. Di sinilah tata cara masyarakat organistik, terencana dan de-mokratis, telah dirintis. Sesuatu yang telah memberi andil besar dalam membentuk gugus baru masyarakat yang menjadi bantalan vital dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

Sayangnya, evolusi kebudayaan tidak selalu berjalan lurus dan bersambung. Munculnya trauma-trauma politik di penghujung Orde Lama, telah melahirkan “bayi traumatik” Orde Baru dengan mekanisme defensifnya berupa negara yang kuat, birokratisasi yang eksekutif, dan meluasnya depolitisasi. Ini semua harus dibayar dengan melemahnya civic culture, mengendurkan social learning, dan melambatnya kreativitas berpikir.

Konsekuensi lebih lanjut dari semua itu adalah munculnya apa yang disebut Ogburn dengan “cultural lag”, yakni tercecernya gerak perkembangan sistem budaya (non-material) dari dinamika pembangunan material (dalam Nagai, 1993, h. 259-260). Yang berlangsung kemudian adalah suatu perkembangan industrialisasi dan adopsi teknologi, tanpa didukung oleh sistem budaya industrial dan saintifik.

Kita dapati di sini, sementara industrialisasi yang sehat perlu didukung iklim budaya yang berorientasi pada prestasi (merit), yang berkembang justru masih dominannya pertambangan-pertambangan askriptif (nepotisme). Sementara industrialisasi dan promosi teknologi hanya bisa tumbuh secara baik dalam situasi budaya yang memacu kompetisi, yang berjaya di sini justru praktik-praktik monopolistik dan kolusif. Sementara perkembangan ilmu yang subur perlu dilandasi semangat kolejial, sikap kritis, dan dialog-dialog inter-kultural, yang dipupuk di sini justru sikap-sikap feodal, anti-kritik, dan kecenderungan nepotis.

Mempertimbangkan hal itu, sudah saatnya kita menyadari bahwa pengembangan teknologi, baik untuk alasan kemakmuran ataupun demi mencegah dampak negatifnya, tidak bisa ditundukkan hanya pada prinsip-prinsip keteknikan atau rasio instrumental semata, tetapi sudah seharusnya ditarik ke jagkar sosio-kultural tempat dialog-dialog konsensual dilakukan. Teknologi terlalu berharga untuk diserahkan hanya pada segelintir elite politik, komersial, dan keilmuan. Untuk itu, sudah seharusnya kita semua melibatkan diri di dalamnya. Seseorang tidak perlu berlatar sains dan teknologi untuk mengenali betapa sentralnya peranan teknologi dalam kehidupan kita.

Jelaslah di sini bahwa, yang diperlukan sekarang adalah suatu komitmen semua pihak untuk melakukan revitalisasi kebudayaan yang sesuai dengan tuntutan penguasaan iptek. Itu berarti, kebudayaan sebagai proses belajar perlu ditransformasikan dari suatu

model budaya ke model yang lain, dengan pendekatan tertentu yang dilakukan secara sadar dan terencana. Dengan kata lain, manusia Indonesia perlu dijadikan sadar akan kebudayaan, dan ini berarti bahwa ia secara aktif harus turut memikirkan dan merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan, dalam rangka mendorong perkembangan iptek. Singkatnya, yang kita perlukan sekarang adalah suatu strategi kebudayaan.

Untuk merencanakan suatu strategi yang adekuat, kita agaknya perlu mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, strategi kebudayaan dimaksudkan untuk menghadapi masa depan dengan segala masalah dan tantangannya. Karena itu, ia harus berorientasi ke depan. Warisan budaya perlu dihargai. Tetapi, agar warisan tersebut dapat menunjukkan maknanya bagi kehidupan masyarakat kontemporer, maka perlu dibuat tafsiran-tafsiran kreatif, beserta kemungkinan penyempurnaannya lewat proses belajar inter-kultural.

Kedua, strategi kebudayaan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, upaya pembangunan iptek sebagai fenomena kerja kebudayaan, secara kualitatif harus mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohaninya secara adil dan merata.

Ketiga, seperti dikatakan Soerjanto Poespowardjo (1993), penyusunan suatu strategi perlu dibuat dengan persepsi budaya yang komprehensif, yang mempunyai cakupan yang luas atas perikehidupan masyarakat Indonesia. Cakupan yang luas itu secara ringkas menyangkut semua faktor budaya yang terdiri atas manusia (anthropos), lingkungan (oikos), alat (tekne) dan komunitas (ethnos).

Anthropos adalah manusia secara individual sebagai faktor sentral dari kerja kebudayaan. Ia bukan saja sebagai pendukung dan pencipta iptek. Karena itu, aspek-aspek kognitif, efektif, dan konatifnya perlu dipupuk dan dikembangkan lewat suatu strategi

pendidikan dan pembudayaan yang sesuai dengan tuntunan zamannya.

Oikos adalah universum kosmis, suatu lingkungan hidup di mana manusia menjalankan proses pembudayaannya. Lingkungan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana bagi kelangsungan hidupnya, melainkan juga sebagai medan yang memungkinkannya berjuang untuk hidup melalui karya-karyanya. Karena itu, dalam segala upaya pengembangan iptek, penting untuk memperhatikan keselarasan hubungan serta menjaga kelestariannya.

Tekne adalah peralatan yang digunakan untuk mengerjakan dunia iptek. Tetapi lebih dari sekadar alat, dalam perkembangan selanjutnya tekne juga mengandung muatan-muatan nilai dan sikap tersendiri. Harus dijaga agar pengembangannya tidak mendegenerasikan martabat manusia hanya menjadi sekumpulan dari suatu tekno-struktur. Karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai etis dan estetis sebagai bingkai dari pengembangan iptek, perlu dipertimbangkan secara seksama.

Sementara ethnos, yang berarti komunitas, menunjukkan bahwa upaya pengembangan iptek sebagai salah satu kerja budaya merupakan hasil interaksi antarpribadi yang tergabung dalam masyarakat. Setiap intuisi, interpretasi, dan karya individu yang bagaimanapun juga unik dan orisinalnya, akan hilang lenyap kalau tidak ditampung dalam dukungan kolektivitas, diartikulasikan dalam keterjaminan yang organis, serta dibudayakan sebagai warisan dan komitmen bersama. Itu berarti, upaya-upaya pengembangan iptek mesti mendapatkan iklim sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan informasi yang kondusif, sejalan dengan dinamika yang ada.

Semua variabel dari strategi kebudayaan itu perlu diperhatikan agar bangsa Indonesia bisa mereguk dua hal sekaligus: daya-dukung budaya bagi pengembangan iptek, dan pendedikasian iptek itu sendiri bagi pengembangan budaya dan peningkatan kesejahteraan rakyat. ◦





LENSA AKTUAL

Tragedi Mina

Petugas penyelamat membawa jenazah jamaah haji yang tewas akibat berdesak-desakan di Mina, di luar kota Makkah, Kamis (24/9). Sebanyak 717 jamaah dari berbagai negara tewas dalam insiden Kamis kemarin di kota Makkah, menurut keterangan aparat berwenang Saudi, bencana terburuk dalam ibadah haji dalam sejarah 25 tahun.

Reuters



Staf Khusus Menteri BUMN Riza Primadi (kedua dari kiri) menyerahkan penghargaan BUMN Marketeers Award 2015 "THE BEST COMPANY" kepada Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga didampingi CEO MarkPlus Inc. Hermawan Kertajaya (paling kanan) dan Pemimpin Redaksi BUMN Insight Hadi M. Djuraid (paling kiri) di Jakarta, Sabtu (5/9).

MARKETING, KUNCI MEMENANGKAN PERSAINGAN

Teknologi informasi dan Komunikasi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, berkembang dengan sangat pesat. Penyebaran informasi yang sebelumnya masih bersifat konvensional, berubah menjadi digital dan *borderless*, tanpa peduli batas tempat dan waktu. Informasi menjadi sangat mudah diakses. Konsumen menjadi selektif dan *demanding* terhadap apa yang diinginkan, maupun yang dibutuhkan.

Fenomena ini menuntut perusahaan

selalu produsen untuk dapat menyesuaikan diri karena persaingan yang semakin kompetitif. Hal ini disadari betul oleh PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom). Lama menjadi *market leader* di industri telekomunikasi, tidak serta merta membuat Telkom cepat puas dan tidak *aware* dengan pentingnya strategi marketing bagi kelangsungan perusahaan.

Dahulu, Telkom merupakan perusahaan *product oriented* yang bersifat *technology driven*. Telkom kala itu menjadi pemimpin dan memonopoli layanan telekomunikasi tanpa ada saingan. Kini, industri

telekomunikasi merupakan industri dengan tingkat persaingan sangat ketat dimana kompetitornya merupakan perusahaan multinasional yang sudah berpengalaman. Menyadari hal tersebut, Telkom mulai melakukan transformasi bisnis, tidak lagi hanya telekomunikasi tapi berubah menjadi *TIMES (Telecommunication, Information, Media, Edutainment & Services)*. Telkom juga bertransformasi menjadi perusahaan *solution oriented* yang bersifat *market/customer driven*. Telkom menciptakan solusi TIK guna memenuhi kebutuhan digital masyarakat di berbagai kalangan.

Beberapa solusi yang dihasilkan Telkom adalah Telkom Solution yang ditujukan untuk pelanggan segmen korporasi dan IndiHome untuk segmen *retail*/konsumer.

Untuk menghadapi tantangan, Telkom memiliki 3 orang Chief Marketing Officer (CMO) dalam struktur organisasinya, yang menjalankan peran marketing perusahaan dengan 3 segmen pelanggan yang berbeda yaitu Konsumer, Enterprise (korporasi) dan *Wholesale*. Telkom menyiapkan strategi marketing yang unik yang dikenal dengan istilah Paradox Marketing, sebuah konsep marketing yang tidak biasa tetapi mampu memberikan hasil luar biasa. Paradox marketing ini merupakan ide *original* Telkom dan menjadi nilai tambah yang tinggi ketika diimplementasikan, baik *value* bagi bisnis maupun bagi *stakeholder*.

Telkom mengimplementasikan Paradox Marketing secara konsisten sebagai *core* penerapan konsep Strategy, Tactical dan Value (STV). Telkom mengimplementasikan Paradox Marketing sebagai *functional strategy* marketing dimana untuk lingkup strategi Telkom menjalankan *mindset* "more for less" atau menawarkan produk atau layanan dengan *benefit* yang

lebih namun pelanggan membayar lebih rendah. Dalam hal ini Telkom menerapkan *economics of scale*, *creative business model* dan penggunaan teknologi baru.

Menghadapi tantangan bisnis ke depan, Telkom akan terus menjalankan strategi bisnisnya secara konsisten. Telkom memiliki keyakinan bahwa strategi bisnis yang dijalankannya akan mampu mendongkrak kinerja perusahaan serta memposisikannya sebagai operator terdepan. Hal ini juga akan membantu Telkom untuk mewujudkan tekadnya menjadi *King of Digital*, didorong dengan gaya hidup digital yang saat ini tengah berkembang, khususnya di Indonesia.

Konsistensi Telkom dalam menjalankan strategi marketing memberikan dampak yang baik terhadap kinerja perusahaan. Pada semester I/2015 Telkom membukukan pendapatan sebesar Rp48,84 triliun tumbuh 12,2 persen dari tahun lalu yang tercatat Rp43,54 triliun. Telkom juga membukukan EBITDA Rp23,54 triliun atau tumbuh 6,3% dari tahun lalu dan laba bersih sebesar Rp7,45 triliun atau tumbuh 2,2% dari tahun lalu. Hampir semua segmen bisnis Telkom memperlihatkan pertumbuhan yang

menggembarakan dan bahkan secara konsisten menguasai pangsa pasar seluler dan *fixed line*.

Tidak hanya kinerja keuangan yang memuaskan, Telkom juga meraih apresiasi dari berbagai institusi untuk implementasi strategi marketingnya. Belum lama ini Telkom dinobatkan sebagai The "Best Company on Marketing" dalam ajang BUMN Marketing Award yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Insight bekerjasama dengan MarkPlus Inc., Indonesia Marketing Association dan The Jakarta CMO Club.

Dalam ajang yang diikuti oleh 32 BUMN ini, Telkom memperoleh predikat The Best Company on Marketing karena berhasil mendapatkan nilai Gold pada kategori Strategic Marketing dan juga nilai Gold pada kategori Tactical Marketing. Telkom dinilai unggul dalam visi, strategi dan implementasi pemasaran. Telkom menerima penghargaan bergengsi tersebut secara konsisten sejak tahun 2013. Bahkan predikat CMO of The Year juga pernah diraih oleh Telkom melalui Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Muhammad Awaluddin pada tahun 2013 dan CEO Telin Singapore, Septika Noegraheni Widyasrini pada tahun 2014.

Tak hanya ajang domestik, Telkom juga meraih penghargaan internasional melalui predikat "Most Honored Organization of The Year" dari Asia Pacific Stevie Awards yang dilaksanakan di Shanghai, Tiongkok. Ini merupakan kali kedua Telkom meraih penghargaan tertinggi dalam ajang se-Asia Pacific tersebut. Penghargaan tertinggi ini diraih karena Telkom memenangkan 10 penghargaan yang terdiri dari 5 Gold dan 5 Silver. Asia-Pacific Stevie Awards adalah ajang penghargaan bagi perusahaan maupun individu yang mencakup 22 negara di kawasan Asia Pasific. Proses penilaian Asia Pacific Stevie Awards tahun ini dibagi dalam dua tahap. Tahap awal telah dimulai sejak Desember 2014 hingga Februari 2015, sementara tahap penjurian final dilaksanakan pada April 2015.



Dalam ajang Asia Pacific Stevie Awards 2015 di Shanghai, Telkom berhasil menjadi juara umum, dengan mendapatkan predikat Most Honored Organization of The Year dari Asia Pacific Stevie Awards. Penghargaan bergengsi tersebut diraih karena Telkom memenangkan 10 penghargaan yang terdiri dari 5 Gold dan 5 Silver.

Bulan Depan Pemerintah akan Naikkan Subsidi PLN

Direktur Utama BPDP Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa pemerintah akan menambah subsidi biodiesel kepada PT PLN (Persero), jika PLN mau meningkatkan penggunaan biodiesel untuk bahan bakar pembangkit.

"Sebelumnya selisih harga yang didukung oleh BPDP sawit itu hanya untuk keperluan PSO. Tapi tadi diputuskan mulai 1 Oktober, maka dukungan itu diberikan juga kepada PLN," ujar Bayu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (22/9).

Dukungan tersebut membuat dana subsidi biodiesel naik jadi Rp500 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Dukungan tersebut digunakan untuk membayar selisih harga antara FAME dengan MOPS solar. Saat ini selisih harga keduanya sekitar Rp2.500 per liter.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menambahkan, untuk tahun ini PLN menargetkan akan menyerap biodiesel sebanyak 266.000 kiloliter (KL).

"Sudah ada penyerapan sebesar 150.000 KL sampai akhir Agustus. Artinya, tiga bulan mendatang akan menyerap lebih dari 100.000 KL lagi," kata Sofyan.

Selain itu, pada tahun depan pihaknya juga siap untuk menerapkan penggunaan Biodiesel sebesar 30%, artinya 30% campuran minyak sawit dalam setiap solar yang digunakan.

"Tahun depan kami target mampu serap 1 juta KL biodiesel. Kami akan beli langsung dari Pertamina. Rencana kebijakan pemerintah ini saya rasa akan berjalan dengan baik. Harga dari petani juga bisa merangkak naik," ungkapnya. /Arbie Marwan-Dhanu Akbar



Mengenang Bang Buyung dan KPK

Sebenarnya kondisi kesehatan Adnan Buyung Nasution sudah mulai menurun sejak Desember tahun lalu.

Akibat sering mengonsumsi obat darah tinggi dan hemodialisis maka Bang Buyung, begitu panggilan akrabnya, menderita gagal ginjal. Dia sempat dirawat di ruang Intensif Coronary Care Unit (ICCU) RSPI Jakarta Selatan beberapa saat dengan alat pencuci darah yang dipasang di tubuhnya secara otomatis nonstop.

Namun, Tuhan memanggil Bang Buyung pada malam hari sebelum Hari Raya Idul Adha (23/9). Dia dimakamkan Kamis (24/9) di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, selepas salat Idul Adha.

Catatan Aktual, meski kondisi kesehatan Bang Buyung sedang turun, ada kasus penting (mungkin kasus terakhir yang dia tangani) yang sempat dia tangani yakni mendampingi Anas Urbaningrum sebagai pengacara di kasus korupsi di KPK.

Meski Anas akhirnya tetap masuk

penjara, namun Adnan memberi garis tebal pernyataan setelah menangani kasus Anas Urbaningrum.

Bagi Adnan, KPK sudah tidak tidak menjadi lembaga yang menjunjung tinggi semangat independensi. KPK digunakan oleh kepentingan politik rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kasus Anas. "Oh itu memang nyata (KPK alat politik). Iya buat saya, KPK ini tidak sepenuhnya independen dan tidak sepenuhnya orang-orang yang ada di sini itu malaikat," tegas Adnan di gedung KPK, Jumat 6 Maret lalu.

Dia meminta agar orang-orang di dalam KPK harus memiliki integritas yang tinggi agar kasus seperti Anas tidak terjadi lagi.

"Mereka ini bukan malaikat, ini yang mereka lupa. Orang-orang yang ada di KPK harus lah tidak lagi mempunyai kepentingan untuk tampil panggung, untuk selalu *show off*, merasa jadi jagoan dan berbuat sewenang-wenang," tegasnya. /M Zhacky Kusumo

Sudah Saatnya Pelaksanaan Haji Libatkan Negara Lain



Ketua DPR RI Setya Novanto prihatin dengan insiden tewasnya ratusan jamaah haji terinjak-injak saat akan melakukan prosesi lempar jumrah di Mina, kemarin, Kamis (24/9).

Terkait hal tersebut, Novanto bersama rombongan DPR seperti Wakil Ketua Fadli Zon dan Fahri Hamzah beserta Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, bertemu dengan Raja Saudi, Salman bin Abdul Aziz.

Novanto mengatakan, dia akan menyampaikan masukan dan saran agar permasalahan haji dapat menjadi perhatian pemerintah Saudi.

“Saya berpendapat saat ini sudah waktunya penyelenggaraan ibadah haji harus melibatkan seluruh negara di dunia. Khususnya negara dengan penduduk Islam terbesar seperti Indonesia, agar seluruh permasalahan haji berikut langkah-langkah penyelesaiannya, dapat meminimalisasikan insiden seperti yang terjadi di Mina kemarin. Saya akan mengutarakan langsung pendapat saya ini kepada Raja Arab Saudi, Raja Salman, yang mengundang saya dalam pertemuan hari ini,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Jumat (25/9).

Novanto juga mendesak Organisasi Konferensi Islam Dunia (OKI) yang terdiri dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim untuk mengambil tindakan penanganan yang diperlukan dalam merespons insiden Mina. Sekjen OKI saat ini, Iyad bin Amin Madani, berasal dari Arab Saudi.

Selain itu, wakil ketua umum Partai Golkar ini juga meminta pemerintah Indonesia sebagai dan negara-negara Islam lain untuk lebih aktif menyumbangkan pemikirannya untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik.

“Kepada Pemerintah kita dalam hal ini Presiden Jokowi, saya harap dan yakin jika beliau akan ikut menyuarakan dan berkontribusi penuh dalam permasalahan ini, sekaligus ikut memberikan solusi bagaimana penyelesaian permasalahan Mina agar tidak terulang pada musim Haji berikutnya,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Insiden Mina kemarin yang menewaskan ratusan jamaah itu bukan insiden yang pertama kali. Bahkan, kejadian ini merupakan terbesar sejak tahun 1990 yang menewaskan kurang lebih 1.400 jamaah. /Nebby Mahbiburrahman-Nailin In Saroh



Sembilan Bulan Singapura Merasakan Oksigen dari Indonesia

Kekecewaan dan kemarahan warga Singapura terkait kabut asap yang memasuki wilayah mereka, ditanggapi oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Menurut Teten, selama 9 bulan ini pihak Singapura merasakan *supply* oksigen dari Indonesia.

“Selama ini *supply* oksigen dari Indonesia selama 9 bulan, dan kita tahu juga banyak industri kebun, tambang, yang menyimpan hasil ekspornya di Singapura,” kata Teten, di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/9).

Dijelaskan, pemerintah tak hanya diam dalam permasalahan kabut asap yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan. “Bahkan sekarang memikirkan bagaimana kebakaran hutan yang terus menerus terjadi selama 17 tahun ini bisa kita hentikan,” jelas Teten.

Asap yang disebabkan dari pembakaran hutan gambut ini, ditindaklanjuti dengan mencabut insentif oknum pengusaha yang sengaja melakukan pembakaran hutan. Selain itu, pengelolaan lahan gambut akan dikaji ulang, mengingat jenis tanaman tersebut mudah terbakar.

Sebelumnya, pihak Singapura kecewa atas peristiwa menyebarnya kabut asap dari wilayah Indonesia. Kekecewaan ini dikarenakan kejadian tersebut masih berulang dan meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan penanganan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Selain Singapura, negara Malaysia juga merasakan imbas kabut asap. /Karel Stefanus



Menelisik Jejak Restorasi di PTUN Medan

Pagi Rabu 23 September 2015 Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Patrice Rio Capella sudah mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Jakarta. Ini baru pertamakali Rio mendatangi kantor lembaga anti rasuah. Ia diperiksa sebagai saksi

kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan.

Pria asal Bengkulu itu tidak mengucapkan apapun kepada awak media usai diperiksa selama 4 jam. Dia hanya melambaikan tangan sebelum masuk ke dalam mobil Honda Freed bernomor polisi B 810

NKC yang mengantarnya.

Pemeriksaan terhadap Rio membuka babak baru dalam kasus suap yang menyeret Gubernur Sumatera Utara (Sumut) non aktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti. Rio diduga mengetahui kasus yang melatari suap terhadap hakim PTUN Medan. Mantan pengacara Gatot, yakni Razman Arief Nasution sempat mengatakan kliennya memiliki konflik dengan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.

Muasalnya adalah mencuatnya penyidikan kasus korupsi Bantuan



Sosial oleh Kejaksaan Tinggi Sumut. Ketegangan ini lantas dimediasi oleh Otto Cornelis Kaligis yang merupakan Ketua Mahkamah Partai Nasdem. Sementara itu Erry adalah mantan Ketua DPW Nasdem Sumut.

Mediasi disepakati dilakukan di kantor DPP Nasdem, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut hadir Tengku Erry dan Gatot beserta petinggi Partai Nasdem termasuk Kaligis. Sementara itu Rizman menyebutkan adanya kehadiran Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan



tersebut.

Kaligis tidak membantah adanya pertemuan tersebut. Usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/9) Kaligis membenarkan. "Sudah saya katakan, (pertemuan) untuk islah. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara," ujar Kaligis.

Ia menyebut ingin mendamaikan Erry dan Gatot lantaran ada demo menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Kaligis mengatakan Surya Paloh tidak memiliki kaitan dengan kasus yang masih terus didalami oleh KPK ini. "Surya Paloh jauh dari ini. Pak Surya sama sekali tidak ada urusan dengan perkara," tegasnya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada wartawan, Senin (28/9) di kantornya menyatakan kemungkinan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap politisi yang beken dengan kalimat restorasi tersebut. "Terserah penyidik, yang jelas kita menghindari, diskriminatif terhadap seseorang sehingga harus diklarifikasi semua," ujarnya.

Sebelumnya KPK mengungkap adanya suap yang diberikan oleh M Yagari Bhastara alias Gary kepada Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro. Suap ini berhubungan dengan upaya untuk memengaruhi putusan gugatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pengujian

kewenangan Kejati Sumatera Utara terkait penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), tunggakan dana bagi hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

Jaksa Agung M Prasetyo membantah adanya unsur politis dalam pengungkapan kasus korupsi bansos oleh Kejaksaan Tinggi Sumut. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono menyatakan penyidik saat ini tengah mendalami modus dari dugaan penyelewengan dana bansos tersebut.

Kejagung telah mulai menyelidiki kasus penyelewengan dana bansos di Sumut sejak 2013. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus tersebut. Kasus penyelewengan dana bansos Sumut ini sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun Pemerintah Provinsi Sumut melalui Kepala Biro Keuangannya, Achmad Fuad Lubis, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas penyidikan atas kasus tersebut. PTUN kemudian mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Fuad.

Sekretaris Fraksi Nasdem Syarief Alkadrie menyebut adanya upaya untuk menyeret Nasdem dalam kasus ini. "Tapi saya lihat memang ada keinginan pihak tertentu untuk mengacak-acak Nasdem," kata Syarief.

Sementara itu anggota Majelis Tinggi DPP Partai Nasdem Lestari Moerdijat menyebutkan partainya tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi. "Sebagaimana yang berlaku dan berjalan selama ini, Partai Nasdem akan memberhentikan atau mempersilakan yang bersangkutan mengundurkan diri jika terkena masalah hukum," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya. ● Wahyu Romadhoni



Empat Pemimpin Dunia Terima Bintang Soekarno

Sebanyak empat tokoh dunia mendapatkan penghargaan Bintang Sukarno atau “The Star of Soekarno”, karena jasa-jasanya untuk keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan dan demokrasi dari Yayasan Pendidikan Soekarno.

Ada pun keempat tokoh tersebut adalah Perdana Menteri Malaysia periode 1981-2003 Tun Mahatir bin Mohamad, Presiden Korea Utara Kim Jong Un, Presiden Venezuela periode 1999-2013 Hugo Rafael Chavez Fraas dan Presiden Kuba periode 1976-2008 Fidel Alejandro Castro Ruz.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri pada Minggu (27/9) malam, di Hotel Borobudur, Jakarta. Selain Mahatir Mohamad, penerima lain diwakili oleh Duta Besar negara masing-masing.

“Para tokoh ini memiliki pemikiran dan tindakan yang mirip dengan Bung Karno. Soekarno selalu berjuang untuk meningkatkan kerja sama bangsa-bangsa di dunia berdasarkan kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan dan demokrasi,” ujar Rachmawati dalam acara tersebut.

Menurut anak ketiga Bung Karno dari Fatmawati tersebut melanjutkan, saat ini pemikiran Sukarno, yang antiimperialisme dan kolonialisme, masih sangat relevan baik untuk

Indonesia maupun dunia.

Peperangan di masa kini, kata dia, bukan lagi berbentuk kontak fisik secara langsung antara dua negara yang saling bermusuhan namun berubah menjadi “proxy war” atau perang proksi.

Perang proksi adalah pertempuran yang memanfaatkan pihak ketiga, tidak secara langsung oleh negara yang berkepentingan. Perang ini kemudian akan menghasilkan pertempuran nonmiliter atau perang asimetris yang melibatkan sumber daya alam, makanan dan ekonomi.

“Oleh sebab itu perlu adanya sinergi antara pemimpin-pemimpin yang memiliki pemikiran Bung Karno, yang di masa hidupnya terus berjuang melawan penjajahan dan peperangan gaya baru tersebut,” tutur Rachmawati.

Ada pun penghargaan Bintang Soekarno dari Yayasan Pendidikan Soekarno sudah diberikan sejak tahun 2001. Termasuk keempat tokoh dunia yang disebutkan sebelumnya, total sudah ada 18 pemimpin dunia yang mendapatkannya.

Di antara nama-nama tersebut ada dua orang dari Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara dan Presiden Indonesia periode 1998-1999 Bacharuddin Jusuf Habibie.

Acara pemberian penghargaan tersebut dihadiri oleh beberapa duta besar dan perwakilan. /Nebby Mahbiburrahman/Ant

Tawarkan Investasi ke Tiongkok, Ketua MPR Dilaporkan ke MKD



Kaukus Indonesia Hebat (KIH) melaporkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait kunjungan kerja Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ke Republik Rakyat Tiongkok (China) beberapa waktu lalu.

“Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR telah melakukan pertemuan dengan para pengusaha China dalam rangka mengajak dan akan menggelar ‘karpet merah’ kepada mereka agar berinvestasi di Indonesia. Sikap dan tindakan Zulkifli Hasan telah menyalahi tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR/MPR sebagaimana diatur dalam UU MD3,” ujar presidium KIH Syarif Hidayatulloh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (24/9).

Menurutnya, Zulkifli telah meruntuhkan marwah lembaga tinggi negara yang dipimpinnya. Terkait hal itu, Syarif juga mengajak anggota DPR RI yang pernah melaporkan Ketua DPR RI ke MKD seperti Adian Napitupulu, Charles Honoris, Diah Pitaloka, Budiman Sudjatmiko, Amir Uskara, Maman Imanulhaq, Akbar Faisal untuk melakukan hal yang sama terhadap ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

“Dengan ini kami warga negara RI yang tergabung dalam Kaukus Indonesia Hebat (KIH) mengundang ketujuh anggota DPR-RI yang bersemangat itu untuk bersama-sama melaporkan Ketua MPR Zulkifli Hasan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” cetusnya. /Ismed Eka Kusuma-Nailin In Saroh

Boediono Sarankan Pemerintah Belajar dari Krisis 1998

Mantan Wakil Presiden Boediono menyarankan pemerintah belajar dari penanganan krisis di masa lalu, agar ketahanan ekonomi lebih siap dalam menghadapi gejolak dan mengatasi berbagai persoalan sosial lainnya.

Kata dia, tindakan pengamanan terhadap datangnya krisis harus diputuskan secara cepat, agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku pasar keuangan dan masyarakat.

“Situasi yang cepat berubah dalam krisis membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan,” kata Boediono di Jakarta, Selasa (22/9).

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mencontohkan penanganan saat krisis finansial yang dialami Indonesia di tahun 1997-1998. Saat itu, kata dia, pengambilan keputusan didasarkan dengan terburu-buru dan tidak layak. Akibatnya, Indonesia justru makin terjerumus dan konsekuensinya malah memberatkan masyarakat.

“Dalam waktu tiga bulan pada 1997-1998 kita tidak mempunyai kebijakan yang layak, padahal pada waktu itu krisis sudah berlangsung. Situasi pun makin memburuk dan bank-bank terancam,” ujar dia.

Namun, lanjut Boediono, pengalaman dari penanganan krisis di tahun 1997-1998 menjadi pelajaran



untuk penanganan krisis di tahun 2008. “Kita belajar dari periode itu dan kita lebih baik dalam menangani krisis pada 2008 dengan respon bagus,” klaim dia.

Sambung dia, yang terpenting dilakukan saat krisis adalah meminimalkan ketidakpastian. Sebab banyak ketidakpastian selama proses pengambilan keputusan.

Lebih jauh dia mengatakanantisipasi terhadap kemungkinan datangnya krisis harus dilakukan sejak jauh hari pada masa normal.

Dan komunikasi antar otoritas terkait pada masa itu harus lebih efektif agar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan informasi yang memadai serta akal sehat.

“Pelajaran berharga ketika terjadi krisis adalah pengambilan keputusan harus diambil oleh ‘right person in the right place’ dan prosesnya harus dimulai pada saat situasinya normal karena bertahan dari krisis tidak mudah, dan secara realistis kita juga harus meminimalisir ‘cost’,” ujar Boediono. /M Vidia Wirawan-Ant

Anggaran Beasiswa Dipotong Rp6 Triliun

Pemotongan pagu indikatif APBN 2016 yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK menysasar berbagai sektor, termasuk anggaran di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Demikian disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya, di Jakarta, Jumat (25/9).

“Di kementerian Ristek Dikti itu ada pemotongan Rp6 triliun oleh Menteri Keuangan yang berdampak

akan banyaknya pemotongan beasiswa mahasiswa di seluruh Indonesia,” kata Teuku.

Menurut dia, pemotongan anggaran yang dilakukan oleh sebuah rezim merupakan hak dan bagian dari proses pembahasan setiap siklus anggaran. Namun demikian, dalam setiap pemotongan tentu harus dicermati apakah wajar atau tidak.

Pasalnya, dalam pemotongan anggaran untuk beasiswa ini terjadi hingga sebesar 60 persen dari jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia.

“Kita akan lihat proses pembahasan

ini, tetapi posisi Komisi X adalah menginginkan bahwa beasiswa terhadap mahasiswa di perguruan tinggi tetap harus diberikan. Setidaknya ada 60 persen pemotongan dari total jumlah mahasiswa itu sendiri,” ujar politikus Demokrat ini.

Seharusnya, di tengah kondisi masyarakat yang sulit seperti sekarang pemerintah memberikan perhatian lebih. “Khususnya terhadap para mahasiswa yang membutuhkan bantuan beasiswa dalam mengenyam pendidikan,” tandasnya. /Karel Stefanus-Novrizal Sikumbang



Rupiah stabil dan berdaulat adalah harapan kita semua. Meski demikian, kenyataan tak selalu berjalan seiring dengan harapan.

Dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar Rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran. Ini artinya, apabila permintaan terhadap dolar AS lebih tinggi, secara alamiah dolar AS akan menguat. Kalau kita ingin menjadikan Rupiah lebih stabil dan menguat, jawaban sebenarnya sederhana, yaitu kurangi permintaan dolar, tingkatkan permintaan atau penggunaan Rupiah.

Namun masalahnya, tentu tak sesederhana itu. Sejak 2011, kondisi di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama dolar AS, daripada pasokannya. Tingginya permintaan Dolar AS itu didasari oleh beberapa alasan, antara lain untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri dan penjualan barang jasa dalam satuan valuta asing.

Kondisi ekonomi global saat ini juga memberi pengaruh. Rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed, telah mengakibatkan dolar AS menguat terhadap berbagai mata uang lain di dunia, termasuk Rupiah.

Di sisi lain, tahun 2005, utang luar negeri atau korporasi atau swasta berjumlah sekitar 80 miliar dolar AS. Di tahun 2015,

jumlahnya meningkat hingga mencapai sekitar 160 miliar dolar AS. Selain itu, rasio pembayaran utang luar negeri swasta terhadap pendapatan ekspor, atau yang dikenal dengan istilah Debt Service Ratio (DSR), juga meningkat dari sekitar 15 persen di tahun 2007 menjadi sekitar 54 persen di tahun 2015.

Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia telah menempuh beberapa kebijakan, antara lain, upaya pendalaman pasar keuangan, agar pelaku pasar memiliki lebih banyak pilihan instrumen dan kemudahan dalam bertransaksi. Bank Indonesia juga melakukan monitoring yang ketat terhadap utang luar negeri, khususnya di sektor korporasi. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 16/20/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri yang mencakup tiga hal, yakni rasio lindung nilai, rasio likuiditas dan peringkat utang.

Simbol kedaulatan

Selain kedua faktor di atas, secara geoekonomi, kita juga melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya dolar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan Rupiah dan cenderung memilih menggunakan mata uang asing.

KEDAULATAN RUPIAH MEMPERSATUKAN 34 PROVINSI DI INDONESIA



Transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antar penduduk Indonesia jumlahnya cukup tinggi. Bayangkan, angkanya mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp78 triliun setiap bulan. Hal ini berarti sekitar Rp936 triliun per tahun.

Tingginya transaksi dalam dolar tersebut telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur hingga perdagangan.

Fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, namun dapat dilihat sebagai bentuk 'ancaman' atau *soft invasion* terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu Negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia dan Pasifik, membuktikan bahwa sikap permisif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya akan memperlemah perekonomian nasional dan menimbulkan ketidakpastian. Kita juga pernah memiliki pengalaman pahit saat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Salah satu alasan yang muncul pada waktu itu adalah karena Rupiah tidak lagi digunakan untuk bertransaksi di sana.

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan tersebut, masyarakat perlu mendukung penggunaan mata uang Rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Mata Uang No 7 tahun 2011, dan selanjutnya, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.

Menjadikan Rupiah sebagai mata uang yang stabil dan berdaulat memang bukan langkah mudah. Tekanan terhadap Rupiah ditentukan oleh banyak hal. Langkah meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengatasi defisit ekspor-impor barang dan jasa, tidak dapat ditawar lagi.

Namun, di sisi lain, upaya menjadikan Rupiah berdaulat di negeri sendiri juga mutlak perlu didukung. Mata Uang Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.





Seorang anak melintas di kawasan permukiman kumuh, di Desa Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (28/9).

Karena Indonesia Terlalu Kaya

Mari kita menengok kembali krisis Ekonomi 1998. Dan berusaha jujur untuk menjawab pertanyaan ini: Siapa yang paling diuntungkan dari krisis tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita membuka lembaran sejarah dan data-data penting soal perekonomian Indonesia di era 1990 an.

Sejak isu globalisasi muncul, Soeharto sebenarnya sudah mulai mengubah cara pandang geopolitiknya. Pengelompokan antarnegara Blok Timur dan Blok Barat sudah tidak bisa dijadikan pegangan untuk memutuskan kebijakan geopolitik Indonesia

pascapecahnya Uni Soviet.

Soeharto saat itu mulai melihat Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia dan negara-negara Islam akan menjadi kutub-kutub baru kekuatan geopolitik dan geoekonomi global. Untuk memainkan peran di geopolitik global, Soeharto saat itu memutuskan untuk memilih menjadi “pemimpin” negara Islam untuk berhadapan dengan AS, Tiongkok dan Rusia karena Indonesia adalah negara terbesar yang penduduknya beragama Islam.

Salah satu cara politis untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kelompok negara Islam adalah dengan mendirikan ICMI, dan mengubah namanya menjadi

Muhammad Soeharto. Ini adalah strategi dan pondasi awal strategi geopolitik Soeharto untuk berhadapan tiga kekuatan besar yakni AS, Tiongkok dan Rusia. Intinya, Soeharto saat itu ingin Indonesia menjadi pemimpin dari negara-negara muslim dunia untuk menghadapi tekanan geopolitik tiga negara besar tadi.

Apa saja yang sudah disiapkan Soeharto?

Sekadar informasi, *blue print* pembangunan di rezim Soeharto semua tercatat dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang I (RPJPI) 1968-1998. RPJP I ini di-breakdown dalam program pembangunan lima tahunan yang sering disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Tahun 1994 sampai Maret 1999 adalah tahapan Repelita VI dengan catatan fokus pembangunannya adalah “Pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta

pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya”.

Di Repelita VI ini tepatnya 1997, berdasarkan catatan data perekonomian saat itu, terlihat pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 persen pertahun. Sedangkan tingkat inflasi selalu bisa dipertahankan di bawah 10 persen. Di sisi ekspor, pertumbuhan ekspor non migas mencapai rata-rata 20 persen per tahun sedangkan pertumbuhan ekspor barang manufaktur rata-rata 30 persen per tahun. Ini sebuah prestasi yang cukup bagus.

Beberapa pondasi pembangunan penting lain yang dilakukan rezim Soeharto dalam skema Repelitanya adalah tercapainya swasembada pangan (1984), berdirinya IPTN untuk membuat pesawat (komersial dan tempur) dan berdirinya PT PAL untuk membuat kapal (komersial dan tempur).

Di sisi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, Satelit Palapa sudah diluncurkan. Untuk pengembangan teknologi nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) juga sudah siap untuk bekerja.

Di industri mobil nasional, Soeharto bahkan berani melawan Jepang (yang *keukeuh* tak ingin melakukan transfer teknologi) dengan mengizinkan Tommy Soeharto menggandeng Korea Selatan untuk memulai proyek mobil nasional Timor.

Di sisi penguasaan geopolitik Asia, Soeharto bahkan membuat pondasi penting dengan mendirikan Otorita Batam. Soeharto tak ingin Selat Malaka “dikuasai” oleh Singapura. Langkah ini membuat Singapura sangat ketakutan. Betapa tidak, kalau Otorita Batam semakin kuat maka Singapura nanti akan jadi Singa’ompong’pura, tak punya gigi lagi untuk menguasai Selat Malaka. Itu belum kemarahan AS, Jepang, Eropa dan Tiongkok yang merasa terusik kepentingan geo ekonomi dan geopolitik globalnya. Intinya, strategi geopolitik dan geoeкономи yang dilakukan Soeharto saat itu membuat marah dan ketakutan banyak negara.

Apalagi ketika 1997, Soeharto

sudah mulai merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang II (25 tahun) sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang I dengan fokus Indonesia akan menjadi negara maju yang setara dengan AS, Eropa, Jepang, Tiongkok dan Rusia. Soeharto sering mengistilahkan dengan kata “Indonesia Tinggal Landas”. Soeharto menyatakan bahwa pada 2005 nanti Indonesia tidak akan lagi “dijajah” oleh negara-negara kuat seperti AS dan sekutunya. Dan pada 2020 nanti, Indonesia akan menjadi pemimpin negara-negara Islam yang ada di dunia ini.

Namun, rencana besar Soeharto itu kandas. Impian besar Soeharto kandas ketika krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia memuncak pada 1998. Ya, Soeharto lengser pasca penandatanganan LoI ke dua dengan IMF dihadapan Direktur IMF saat itu, Michael Camdesu.

Apa yang terjadi setelah penandatanganan tersebut?

Beberapa tahun lalu, sebuah kajian mendalam yang dilakukan Kompas dalam bentuk tulisan “Presiden Soeharto dan Misteri Kemelut 1998” menyatakan seperti ini: “Tidak banyak yang memahami bahwa krisis politik itu sebenarnya merupakan skenario besar untuk memenggal agenda tinggal landas (PJP II.red) dan penumbangan Presiden Soeharto merupakan rute paling pendek menguasai aset-aset strategis Indonesia.”

Kompas cukup jeli melihat apa yang terjadi dibalik krisis 1998 itu. Resep dan skenario IMF justru bukan memperbaiki perekonomian Indonesia. Tapi mendekonstruksi sistem ekonomi dan politik di Indonesia. Dengan kata-kata “janji dewa” seperti deregulasi, debirokratisasi, desentralisasi, privatisasi, KKN, HAM dan Transparansi sebagian rakyat sempat dibuat terbuai.

Padaahal “janji dewa” itu justru membuat sebagian besar aset-aset BUMN dijual ke asing, sumber daya alam dijual amat murah dan banyak dikuasai asing, subsidi dicabut, terjadi liberalisasi pasar modal, pasar

uang, perbankan dan perdagangan. Bangunan sistem ekonomi politik dan pondasi menuju lepas landas yang dibangun Soeharto selama 30 tahunan itu hancur.


Intinya Indonesia tidak boleh jadi negara besar, tidak boleh berdaulat secara ekonomi, politik dan budaya. Direktur IMF saat itu Michael Camdesus dalam sebuah pernyataan di New York Times beberapa tahun lalu mengaku seperti ini: “*We created the conditions that obliged President Soeharto left his job*”.

Ya, peran IMF lah yang menyebabkan nilai Rupiah saat itu naik dari Rp4000/USD ke Rp17.000/USD. Lembaga strategis yang dulu sangat diandalkan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju seperti IPTN, PT PAL, PT Pindad, Satelit Palapa sampai otorita Batam sekarang “tak berdaya”. Program swasembada pangan yang dulu mendapat pujian dunia itu kini hanya jadi program di atas kertas saja. Negara ini lebih nikmat dengan impor.

Beberapa paket deregulasi, privatisasi dan desentralisasi (baca: otonomi daerah) memaksa Indonesia tidak lagi berdaulat atas apa yang dimilikinya. Sebagian besar Undang-undang yang ada selalu bermuatan “titipan” atau paksaan akibat konsekuensi pinjaman uang dari lembaga dan negara donor. Tak salah kalau beberapa kalangan mengatakan bahwa kepentingan asing lah yang mendesain semuanya agar Indonesia tetap menjadi negara kuli, budak negara asing dan perusahaan multinasional.

Ini karena Indonesia terlalu kaya sumber daya alamnya, terlalu strategis letak geopolitiknya, dan potensi demografisnya sangat menjanjikan untuk dijadikan pasar produk-produk negara asing.

Jadi jawaban pertanyaan “siapa yang paling diuntungkan?” sudah terjawab. Sebagian besar agenda-agenda reformasi pascalengsernya Soeharto ternyata sebagian besar menguntungkan asing. Bukan rakyat.

Mudah-mudahan ini bisa jadi cermin buat rezim saat ini....  Ismed Eka/Dhanu

Dalam Telikungan Para Pemain Migas, Tambang dan Pertanian Berskala Global

Pemerintah dan masyarakat abai geopolitik sejak era pasca reformasi. Sehingga pemerintahan Jokowi-JK sekalipun tidak menyadari betapa epicentrum abad 21 sejatinya berada di Indonesia. Tidak percaya? Mari kita telisik faktanya sebagai berikut:

Pertama, ada sekitar 40-an juta ton cargo melintas, dan 21-an juta barel minyak melewati perairan Indonesia (bandingkan dengan Selat Hormuz yang hanya 17 juta, atau Selat Malaka 15 juta barel, dan lain-lain) dari Timur Tengah ke Asia Pasifik, dimana dekade 2030-an diprediksi akan meningkat dua kali lipat.

Kedua, selain hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia, ia pun dapat membahayakan pemanasan global (karena kontribusi 2 % perusak hutan), juga berlimpahnya energi alternatif semacam panas bumi, hydro, solar, angin dan biofuel dari tumbuhan (jarak, sagu, tebu, ubi kayu, dll) termasuk ethanol, alkohol dan sebagainya. Singkatnya, hampir semua ada serta berlimpah di Indonesia

Ketiga, fakta yang tak boleh dipungkiri bahwa Indonesia itu penghasil lada putih nomor 1 (satu) di dunia, produsen kayu lapis terbesar, penghasil puli dari buah pala terbaik di dunia, LNG terbesar, dan juga penghasil lada hitam, karet alam, minyak sawit (CPO), timah -untuk tiga komoditas terakhir ini terbesar

kedua di dunia.

Keempat, fakta-fakta lainnya bahwa ia merupakan negara penghasil tembaga nomor tiga di dunia, penghasil kopi dan karet sintetik ke empat dunia, selain penduduknya juga menempati urutan ke empat terbesar di muka bumi.

Kelima, selain itu, sebagai negara agraris juga memiliki pantai terpanjang kedua di dunia, saat ini Indonesia dinilai sebagai penghasil ikan nomor enam dunia, termasuk teh, biji-bijian, dan lain-lain.

Keenam, untuk hasil tambang, malah lebih fantastik lagi. Sebagai negeri *ring of fire* (lingkaran sabuk api) maka berbagai jenis dan aneka tambang pasti berserak di negeri ini, seperti gas alam, emas, batu bara -ketiganya nomor enam di dunia. Indonesia juga penghasil minyak bumi nomor sebelas dunia (data minyak ini perlu *cross check* kembali), kemudian juga penghasil aspal, bauksit, nikel, granit, perak, uranium, marmer dan mineral ikutannya serta pasir besi dengan kualitas terbaik di dunia.

Ketujuh, selain potensi pariwisata yang besar baik berupa pemandangan alam, beberapa pantainya mempunyai ombak terbaik di dunia untuk *surfing*, kemudian adat, budaya dan banyaknya situs serta artefak kejayaan masa lalu masih terawat baik, bahkan temuan terbaru perihal artefak kejayaan nusantara (Piramida Gunung Padang) bakal



mengubah dunia, bahkan mungkin dapat merobek buku sejarah sejak halaman pertama --juga tak lupa ialah *local wisdom* bangsa ini berupa keramah-tamahan warga lokal terhadap pendatang (tourist) kendati nilai-nilai tersebut kini telah mulai luntur karena faktor lingkungan yang berubah serta tak terbandung.

Geoposisi Silang Indonesia

Karena tidak kenal diri, maka kita tak pernah tahu diri, apalagi tahu harga diri. Kita tidak mengenali kekuatan dan kedahsyatan kita yang sesungguhnya. Bahkan letak Indonesia di antara dua samudra dan dua benua, tidak kita sadari nilai strategisnya secara geopolitik.

Menurut Dr Dirgo D Purbo, pakar perminyakan, 50% yang melintas di perairan Indonesia



adalah tanker-tanker minyak dunia. Data di Lemhanas RI, "Hampir 50 % perdagangan laut komersial dunia dilakukan melalui perairan Indonesia dan perairan regional kawasan ini. Hampir dipastikan bahwa dalam pandangan negara-negara lain sebagai pengguna, jalur strategis ini punya arti yang sangat vital dan strategis bagi perdagangan internasional mereka," ungkap Gubernur Lemhanas, Prof Dr Ir Budi Susilo Soepandji dalam seminar nasional yang digelar GMNI di Sahid Jaya Hotel, Jakarta setahun yang lalu.

Dengan begitu, secara geostrategi kedahsyatan geopolitik silang yang jarang dimiliki negara manapun ini, meniscayakan Indonesia berdaya tawar tinggi di panggung (politik) global. Bahkan seharusnya Indonesia mampu merajut hubungan dengan

berbagai negara di antara dua benua dan samudera.

Hanya saja ya itu tadi. Karena kita tidak mengenali nilai strategis wilayah-wilayah kita secara geopolitik, bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Kita bahkan tidak mampu mengenali apalagi memrediksi potensi-potensi ancaman yang kiranya bakal kita hadapi kini dan kelak.

Dalam perspektif kolonialisme global, takdir geopolitik yang begitu menggiurkan (potensi ekonomi, demografi dan geopolitik silang), niscaya akan menempatkan Indonesia pada posisi:

(1) sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju;

(2) sebagai pasar bagi barang-barang jadi yang dihasilkan oleh

negara-negara industri maju; dan

(3) sebagai pasar guna memutar ulang kelebihan kapital yang diakumulasi oleh negara-negara industri maju tersebut (Bung Karno, 1955). Nampaknya, inilah yang tengah berlangsung secara masif, sistematis dan terencana di tanah air.

Sialnya, potensi-potensi ancaman yang lahir dari nilai-nilai strategis yang melekat dalam wilayah-wilayah NKRI secara geopolitik, sama sekali tidak kita ketahui. Bukannya menjadikan dan memanfaatkan nilai strategis negeri kita secara geopolitik, negeri kita malah jadi sasaran "proxy war" berbagai kepentingan-kepentingan negara-negara adikuasa di bidang ekonomi, untuk merebut penguasaan kekayaan alam Indonesia seperti digambarkan di atas.

Siapa Penguasa Sektor Energi dan Tambang Dunia Saat Ini?

Setelah kita mengenali takdir geopolitiknya, dan tahu betapa menggiurkannya kita secara geopolitik, lantas kita perlu tahu kekuatan-kekuatan dan para pemain kunci berskala global yang pastinya akan mengincar Indonesia untuk dikuasai dan ditaklukkan.

Di sektor energi dan tambang, setidaknya ada 25 aktor kunci di kedua sektor ini yang sekarang menguasai dunia, dan boleh dibilang sebagai VOC-VOC Gaya Baru.

Bersama-sama mereka mewakili bagian perdagangan energi dan mineral dunia terkemuka, dan umumnya mereka melakukan bisnis melalui cara yang terstruktur sesuai dengan norma-norma keuangan global. Dengan kata lain, mereka mengoperasikan bisnisnya berdasarkan skema IMF dan Bank Dunia.

Di luar jajaran papan atas tersebut, terdapat 200 perusahaan besar dengan skala yang setara seperti Statoil, Eni, BG Group, Pemex, Petronas, Occidental, Suncor Energy, Nippon Street, dan divisi pertambangan dan energi kelompok Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Sumitomo, dan ITOCHU.

25 Aktor Kunci di Sektor Energi dan Tambang

Rex Tillerson, ExxonMobil
Peter Voser, Royal Dutch Shell
Jiang Jiemin, China National Petroleum
Khalid al-Falih, Saudi Aramco
Bob Dudley, British Petroleum
Marius Kloppers, BHP Tinto
Tom Albanese, Rio Tinto
Mick Davis, Xstrata
Murilo Ferreira, Vale
Cynthia Carroll, Anglo American
Maria das Gracas Silva Foster, Petrobras.
John Watson, Chevron
Alexei Miller, Gazprom
Christophe de Margerie, Total
Fu Chengyu, Sinopec
Yang Hua, CNOOC
Jim Mulva, ConocoPhillips
Eduard Khudainatov, Rosneft
Zhang Xiwu, China Shenhua Coal
Zohra Chatterji, Coal India
Mukesh Ambani, Reliance Industries
Sudhir Vasudeva, ONGC
Lakshmi Mittal, ArcelorMittal
Chung Joon-yang, POSCO
Mitsunori Takahagi, JX Holdings

Tapi yang kita seringkali kecolongan adalah, bahwa di bawah perusahaan-perusahaan global ini terdapat dunia persaingan usaha bak labirin yang mendalam dan beragam, di mana ribuan perusahaan berpengaruh tapi relatif tak dikenal lainnya, melakukan bisnis sehari-hari mereka di tempat yang kadang-kadang bisa kotor, ilegal, dan berbahaya.

Namun di luar yang 25 pemain kunci tadi, Koch Industries, kiranya perlu dapat sorotan khusus. Perusahaan yang dikelola oleh miliarder Koch bersaudara, Charles dan David, merupakan putra-putra dari sang pendiri, Fred Koch, yang berbasis di Wichita, Kansas. Koch Industries merupakan salah satu perusahaan privat terbesar di dunia,

dengan omzet sekitar USD100 miliar dan 70.000 karyawan tersebar di 60 negara. Koch Industries memperdagangkan komoditas dari kantor-kantornya di Wichita, Houston, New York, Rotterdam, Mumbai, Singapura, Jenewa, Paris, London, dan Calgary; menjual-beli minyak mentah, gas alam dan gas cair, produk minyak bumi hasil olahan, batu-bara, kokas, semen, pulp(bubur kertas) dan kertas, dan produk lainnya.

Menariknya lagi, Koch Industries tidak sekadar melakukan kegiatan perdagangan. Perusahaan ini juga mengelola kilang-kilang minyak di Rotterdam, Texas, Minnesota dan Alaska; memegang saham di Trans-Alaska Pipeline, dan menjalankan jaringan pipa minyak dan gas lainnya. Bisnisnya juga meliputi bahan kimia, peternakan, polimer dan serat, pupuk, teknologi dan peralatan pengendalian dan pemrosesan pencemaran, dan produk konsumen dan kesehatan.

Charles dan David Koch masing-masing menguasai 42 persen saham perusahaan.

Cargill, VOC Gaya Baru di Sektor Pertanian

Di sektor agribisnis, perusahaan privat AS, Cargill, merupakan pedagang komoditas pertanian terbesar, dengan omzet USD108 miliar pada 2010, mengalahkan dua perusahaan publik: Acher Daniels Midland (USD62 miliar) dan Bunge (USD46 miliar).

Rekanan Cargill di sektor pertanian adalah perusahaan privat Perancis Louis Dreyfus (USD20 miliar), perusahaan publik Singapura Olam Internasional (USD6 miliar), dan perusahaan berbasis di Hongkong, yang terdaftar di Singapura Noble Group, yang menyebut dirinya sebagai pedagang komoditas terdiversifikasi terbesar di Asia. Omzetnya lebih dari USD57 miliar pada 2010 dalam produk pertanian, energi, logam, dan mineral.

Kelompok agribisnis penting

lainnya adalah koperasi petani Jepang Zen-Noh, dengan omzet USD64 miliar (terutama dalam bisnis domestik) dan importir/eksportir minyak dan makanan Cina COFCO (USD26 miliar). Semua pedagang agribisnis itu mengembangkan kepemilikan pada lahan makanan, perkebunan, dan pertanian lainnya di luar negeri untuk menyongsong apa yang mereka lihat sebagai masa kelangkaan sumberdaya yang akan datang.

Bagi Indonesia, tren ini harus dipandang sebagai potensi ancaman. Selain karakteristiknya yang bersifat ekspansionis dan agresif, sebagai korporasi mereka sudah mampu membaca tren perlunya mengembangkan kemampuan swadaya pangan. Sedangkan ketahanan pangan kita justru berada dalam bahaya.

Sogo Shosha Jepang Masih Tetap Sebagai Ancaman

Meski sekarang Jepang sedang menurun, tetap penting bagi kita untuk membedah anatomi Sogo Shosha, sekumpulan perusahaan-perusahaan perdagangan umum Jepang yang ragam produksinya jauh melampaui makanan, mineral, energi hingga ke pembiayaan, investasi, dan pembuatan kesepakatan. Pada 1980-an dan 1990-an, perusahaan-perusahaan seperti Mitsubishi Corp, Mutsui & Co, ITOCHU Corp, Sumitomo Corp, dan Marubeni Corp, benar-benar mendominasi perdagangan global pada berbagai produk industri dan pertanian, jasa, dan bahan baku. Namun pengaruh mereka telah berkurang jauh saat ini. Bahkan sekitar 15 tahun lalu, daftar perusahaan top dunia menurut pendapatan ditempati oleh Perusahaan Jepang pada 6 dari 10 tempat teratas. Sedangkan tiga pertama adalah Mitsubishi. Mitsui dan ITOCHU. Di tempat keempat adalah produsen mobil AS General Motors, diikuti oleh Sumitomo dan Marubeni, Ford Motor, Royal Dutch Shell, Toyota Motor, dan Exxon.

Namun saat ini, hanya Toyota



yang merupakan satu-satunya perusahaan Jepang. Beberapa nama besar sogo Shosha di masa lalu telah lenyap seperti Nissho Iwai dan Nichmen bergabung pada 2004 untuk menciptakan Sojitz Corp.

Begitupun, ekspansi korporasi-korporasi global Jepang masih tetap harus diwaspadai oleh Indonesia. Beberapa perusahaan papan atas Jepang tetap merupakan kekuatan ekonomi yang cukup besar seperti Toyota Tsusho, yang menyerap Tomen pada 2006 lalu, dengan omzet lebih dari USD800 miliar per tahun. Mereka tetap menjadi pemain dan investor utama dalam proyek-proyek sumberdaya global, khususnya di Australia, Amerika Selatan, dan Amerika Utara, dan dengan peningkatan minat atas India, Cina dan Afrika.

Keterlibatan khas mereka adalah saham patungan Mitsui dan Mitsubishi dalam proyek gas Australian North West Shelf. Kemudian peran Mitsubishi dalam perdagangan biji besi dan batu bara di Kanada, Brazil, dan Australia. 20 persen saham ITOCHU pada pertambangan batu bara Kolombia oleh perusahaan AS Drummond, dan 45 persen saham Sumitomo di proyek pertambangan tembaga-molibdenum Sierra Gorda di Chili yang akan datang.

Memetakan Aktor-Aktor Migas Cina Berskala Global

Cina merupakan negara yang tergantung pada impor minyak dari luar negeri. Untuk memburu dan mendapatkan sumber energi berupa minyak dan gas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, negara tirai bambu itu mengandalkan tiga National Oil Company (NOC) utama mereka yaitu, CNPC (PetroChina), Sinopec dan CNOOC.

CNPC terbentuk pada 1988 sebagai pengganti Kementerian Industri Minyak. CNPC merupakan NOC Cina paling besar dalam produksi minyak dan perolehan keuntungan, namun masih kalah dalam hal pendapatan dari Sinopec.

CNPC terbentuk didasari gagasan agar Cina sebagai negara pengimpor minyak bumi, maka pemerintah Cina mencanangkan adanya BUMN sektor energi yang mampu menjadi penyuplai energi yang handal dan memenuhi permintaan energi dalam negeri yang kian meningkat. Maka CNPC merupakan perusahaan negara yang langsung berada dalam pengawasan pemerintah.

Pada 2008 CNPC mencatat keuntungan bersih sebesar RMB 91.65 miliar setara dengan USD13.196 miliar.

Adapun bisnis inti dari CNPC

adalah dalam eksplorasi serta produksi minyak dan gas (upstream), serta *mid-downstream* yaitu kegiatan penyulingan, pengolahan migas, distribusi, dan pemasaran. Produk yang dihasilkan CNPC adalah bensin, minyak tanah, solar, serta oli dan pelumas.

CNPC tercatat beroperasi di 29 negara. Di Afrika: Sudan, Aljazair, Chad, Nigeria, Mauritania, Libya, Tunisia, Guinea Khatulistiwa, dan Afrika Tengah. Di Asia Tengah: Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan Rusia. Kawasan Amerika: Kanada, Kuba, Kosta Rica, Ekuador, Peru, Venezuela. Timur Tengah: Iran, Irak, Oman, dan Suriah. Di Asia; Indonesia, Myanmar, Mongolia, dan Thailand.

Kiprah CNPC di Indonesia dimulai saat masuknya Petro China pada 2002. Petro China sebagai anak perusahaan CNPC melakukan akuisisi terhadap Devon Energy di Indonesia, dan melalui Petro China International Indonesia Ltd, secara resmi Petro China hadir di industri pertambangan minyak dan gas Indonesia. Pada 2003, Petro China membeli 45 persen saham kepemilikan pada kapal operator di ladang minyak Indonesia, dan pada 2004 Petro China memiliki 25 persen kepemilikan dan hak beroperasi di ladang minyak Sukowati. Saat ini Petro China memiliki beberapa kilang minyak dan gas di Indonesia seperti Jabung (Jambi) Papua, dan Jawa Timur.

Petro China berinvestasi dan mengembangkan ladang migas di Jambi (Jabung dan Bangko), Papua (Salawati), dan Jawa Timur (Tuban). Petro China melakukan kerjasama Production Sharing Contract (PSC) di Blok Jabung, sementara Blok Tuban dan Blok Salawati merupakan kerjasama Joint Operation Body dengan Pertamina.

Tidak sampai di situ saja. Pada 2003 Petro China bahkan pernah menawarkan untuk mengembangkan 10 blok migas di Indonesia. Kesepuluh blok tersebut tersebar di Aceh, Banten, Jawa Timur, dan

Papua. Dalam proses tender Petro China berkompetisi dengan Chevron Pacific. Sampai sekarang, di era pemerintahan Jokowi-JK, belum diketahui siapa yang memenangkan blok-blok migas baru yang tersebar di keempat provinsi tersebut.

Dalam pertarungan global antara AS versus Cina di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Riau merupakan sasaran kedua adikuasa. Yang menjadi incaran adalah Blok Natuna D Alpha di Riau. Blok Natuna telah menjadi incaran berbagai perusahaan multinasional seperti Shell, Exxon, Petronas, dan lainnya.

Bahkan di Blok Jabung (Jambi) saat ini dikelola oleh Petro China bersama-sama dengan perusahaan Amerika ConocoPhillips dan Pertamina. Hal ini menggambarkan betapa selain persaingan, juga tak tertutup kemungkinan adanya konsesi seperti terjadi antara Petro China dan ConocoPhillips di Blok Jabung.

Petro China Company LTF

Petro China Company Limited merupakan perusahaan (produsen) serta distributor minyak dan gas terbesar di Cina. Memegang peranan penting dalam industri migas di Cina. Petro China sebagai perusahaan yang berada dalam group CNPC bergerak di bidang kegiatan eksplorasi, pengembangan produksi atau *research and design*, penyulingan, transportasi, dan pemasaran minyak dan gas.

Petro China beroperasi di 26 negara. Petro China juga aktif berinvestasi di luar negeri dengan cara akuisisi atau merger. Indikator ini terlihat dalam perdagangan saham internasional di mana Petro China memiliki saham di Hongkong, Shanghai, dan New York.

Petro China berhasil membangun tempat transit internasional antara lain di Minas, Basrah (Irak), dan Oman untuk keperluan penyulingan minyak, gas, dan industri pendukung.

Untuk memenuhi kebutuhan domestik, Petro China menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan multinasional energi terkemuka. Pada Februari 2002,

Pekerja melakukan aktivitas di area fasilitas pencairan gas alam di Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, Senin (21/9).



Petro China melakukan kerja sama luar negeri dengan Royal Dutch Shell, Gazprom, dan Hongkong & China Gas untuk membangun jaringan pipa gas sepanjang 2600 mil dari lapangan gas Tarim Basin ke Shanghai. Pembangunan dimulai pada 2004 dan saat ini jaringan gas telah berfungsi untuk memasok gas ke daerah Shanghai. Biaya yang dikeluarkan oleh ketiga perusahaan mencapai USD18 miliar.

Selain itu, Petro China berencana untuk ekspansi ke luar negeri dengan menanam investasi sebesar USD60 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksi migas dari operasi internasionalnya. Suriah, Iran merupakan salah satu sasaran pokok Cina di Timur Tengah. Seperti pembangunan kilang minyak di Suriah yang berkapasitas 5 juta ton per

tahun atau 100 ribu bph. Kilang itu digunakan untuk mengolah minyak dari Iran. Maka Petro China sempat membeli 35 persen saham milik Shell di Suriah.

SINOCPEC Indonesia

Sinopec Corp mulai masuk kancah pertarungan antar pemain migas di Indonesia sejak Juli 2005, ketika ditandatangani perjanjian kerjasama proyek eksplorasi minyak di Tuban, Jawa Timur. Ladang minyak tersebut diperkirakan mampu memproduksi minyak sampai dengan 200.000 barrel per hari. Kehadiran Sinopec Internasional E & P Ltd di Indonesia diwakili oleh Sinopec International Petroleum E & P Co yang bertanggungjawab atas PSC di Blok Binjai. Dalam operasinya, Sinopec bekerjasama dengan PT Telaga



Binjai Energy. Pada 2006, Sinopec melakukan kegiatan eksplorasi di Blok Binjai, sumur Batumandi North I, sayangnya belum menemukan kandungan hidrokarbon.

Sekadar catatan. Sinopec di Indonesia lebih terkenal dengan kiprah investasinya di bidang energi terbarukan dan investasi infrastruktur kilang pengolahan minyak. Investasi di bidang energi terbarukan adalah pembangunan pabrik pohon jarak dan kelapa sawit di provinsi Papua dan Kalimantan Timur.

Sinopec bekerjasama dengan PT Puri Usaha Kencana dalam pembangunan pabrik pengolahan biofuel. Total investasi Sinopec dalam biofuel di Indonesia mencapai USD 5 miliar. Hal ini setara dengan investasi CNOOC untuk membangun tiga pabrik biofuel di Kalimantan.

Pada bidang infrastruktur Sinopec bekerjasama dengan Pertamina membangun kilang pengolahan di Provinsi Banten guna mendukung tercapainya target produksi minyak nasional 200.000 bph.

China National Offshore Oil Corporation(CNOOC)

Dalam skema Cina, pengusaha memang ditempatkan di garis depan untuk membuka lahan-lahan baru. Tak terkecuali sektor usaha yang langsung di bawah pengawasan dan pengendalian pemerintah Cina seperti CNOOC. CNOOC berdiri pada 1982 yang tugas pokoknya adalah untuk melakukan eksplorasi dan produksi minyak di lepas pantai, serta bekerjasama dengan perusahaan multinasional.

CNOOC ini sangat diperhitungkan oleh para pemain kunci migas di dunia internasional, termasuk Amerika Serikat. Pada 2005 lalu, CNOOC pernah melakukan penawaran kepada Unocal Corps sebesar USD18,5 miliar, untuk membeli mayoritas saham perusahaan multinasional AS tersebut. Namun Unocal menolak, karena pemerintah AS membaca langkah Cina tersebut bakal membahayakan industri strategis dan keamanan nasional AS.

Meski gagal, namun CNOOC telah membuktikan diri sebagai kekuatan migas berskala global yang tidak bisa dianggap enteng. Ya, CNOOC memang berupaya menjadi perusahaan energi internasional.

Kiprah CNOOC di Indonesia bermula ketika NOC Cina ini membeli saham ladang minyak di Selat Malaka sebesar 32,5 persen pada 1993. Yang kemudian menambah kepemilikan sahamnya dengan membeli 6,93 persen pada 1995.

Pada November 2002, CNOOC resmi membeli saham Repsol YPF di Indonesia. Maka lahirlah CNOOC South East Sumatera(SES) Ltd. Mereka bekerja sama dengan enam perusahaan energi, antara lain Inpx Sumatera (13 persen), KNOC Sumatera Ltd (8,9 persen), Orchard

Energy Sumatera BV (5 persen), Fortuna Resource (Sunda) Ltd (3,7 persen), Talisman Asia Ltd (2 persen), dan Talisman Energy Inc (1,6 persen).

Dengan pembelian tersebut, CNOOC SES Ltd menguasai 5 ladang minyak Repsol YPF dari 7 ladang minyaknya. Kelima ladang minyak tersebut terletak di lepas pantai utara Jawa Barat (36,72 persen), bagian barat daya Sumatera (65,34 persen), bagian barat Madura (25 persen), Poleng (50 persen), dan Blora (16,7 persen).

Dalam bidang gas alam, yang paling kontroversial terjadi semasa pemerintahan Megawati Sukarnoputri, ketika pada 2002 CNOOC ikut serta dalam eksplorasi ladang gas alam cair /LNG di Tangguh, Papua. Proyek tersebut senilai USD8,5 miliar itu dipandang oleh berbagai kalangan di Indonesia, cenderung menguntungkan Cina ketimbang kepentingan nasional Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan menyediakan LNG sebanyak 24 juta metrik ton setiap tahun selama 15 tahun. Perjanjian dimulai sejak 2008.

Nampaknya Megawati maupun Presiden berikutnya, SBY, tetap gagal dalam memperkuat posisi tawarnya terhadap Cina.

Terkait asumsi bahwa Indonesia merupakan tujuan imperialisme dan kolonialisme global karena faktor geopolitiknya, maka pola serta modus peperangan asimetris di muka bumi mutlak harus diajarkan kepada segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, baik mulai tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi.

Dilatar-belakangi keprihatinan, bahwa Indonesia kemarin, kini dan mungkin ke depan tengah dijadikan ajang medan tempur (proxy war) oleh para adidaya secara asimetris (nirmiliter). Tetapi justru banyak tokoh agama, tokoh adat, kaum akademisi, dan generasi muda tak menyadari, atau bahkan larut, pada skema yang sedang dijalankan oleh kepentingan asing. • Hendrajit



WAWANCARA

ICHSANUDDIN NOORSY:

TERJADI GOVERNMENT FAILURE



Beberapa saat lalu Aktual mendapat kesempatan untuk ngobrol seputar tema-tema ekonomi politik penting di Indonesia dengan Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, Msi.

Pria kelahiran Jakarta, 9 September 1958 ini selalu konsisten mengkritisi beberapa kebijakan ekonomi politik yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Kepada Aktual dia berbicara panjang lebar soal investasi, cara penanganan krisis sampai isu-isu sosial akibat dampak kesalahan kebijakan.

Mantan wartawan yang pernah jadi anggota DPR/MPR (1997-1999) ini tak pernah takut dalam bersikap dan berani mengungkapkan fakta-fakta dan gagasannya dengan landasan data yang dia miliki.

Banyak kalangan yang merah kupingnya ketika kritiknya menohok langsung. Namun, gagasan dan idenya untuk memperbaiki Indonesia dari sisi “non mainstream” harus dilihat sebagai catatan penting yang harus dipertimbangkan agar sebuah kebijakan ekonomi politik yang dibuat tidak salah arah.

Demikian obrolan Aktual dengan Ichsanuddin Noorsy.

Apa sebenarnya masalah yang terjadi di negara ini?

Kita tidak bisa melihat apa sebenarnya permasalahan Negara ini jika kita tidak melihat proses secara struktural. Ketika langsung pada fokusnya dan tidak tahu akar masalah, maka kita akan kehilangan frame, dan kehilangan pijakan. Sehingga akhirnya kita hanya akan tahu permasalahan tanpa mengetahui penyebabnya. Nah kita acap kali tidak sabar untuk menstrukturkan masalah dengan benar.

Ada sistem yang salah?

Hehehehehe... inilah problem yang terjadi. Apa bisa kita berharap pada sistem politik yang transaksional, melahirkan suara semu, melahirkan kebijakan semu, yang akhirnya berujung pada otoritas

semu. Otoritas semu kemudian melahirkan *distrust disorder* *disobidion*. Kemudian melahirkan lagi *crime reid*, yang masuk lagi dalam 5 tahun berikutnya, muncul lagi dalam politik transaksional. Ketemu siklus, dia berputar terus. Harus ada pemotong lingkaran setan kayak begini. Harus ada!!! Allah SWT bilang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kemudahan tanpa kesulitan. Tidak ada kesulitan tanpa kemudahan. Jadi kita tetap punya keyakinan, bahwa ada jalan keluar.

Jadi, menurut anda apapun kebijakan ekonomi politik yang dikeluarkan pemerintah tidak akan pernah bisa memperbaiki situasi?

Iya, karena akar masalahnya bukan pada persoalan fiskal atau moneter. Kebijakan dasarnya semestinya adalah bagaimana kita memperbaiki struktur perekonomian dalam negeri yang demikian rapuh ini. Ini kerapuhan yang sangat luar biasa. Bukan kegagalan Negara (*state failure*), tetapi kegagalan pemerintahan (*government failure*). Ketika terjadi *government failure*, maka anda akan mencari *market failure* (kegagalan pasar). Jadi kalau kita mau berfikir secara mendalam, ketika lahir istilah *government failure* dan itu dilanjutkan pada kegagalan fiskal dan moneter, harusnya ketika saat yang sama anda harus berfikir *market failure*. Ternyata yang terjadi pada kita adalah kedua-duanya.

Termasuk Nawacita ala Jokowi?

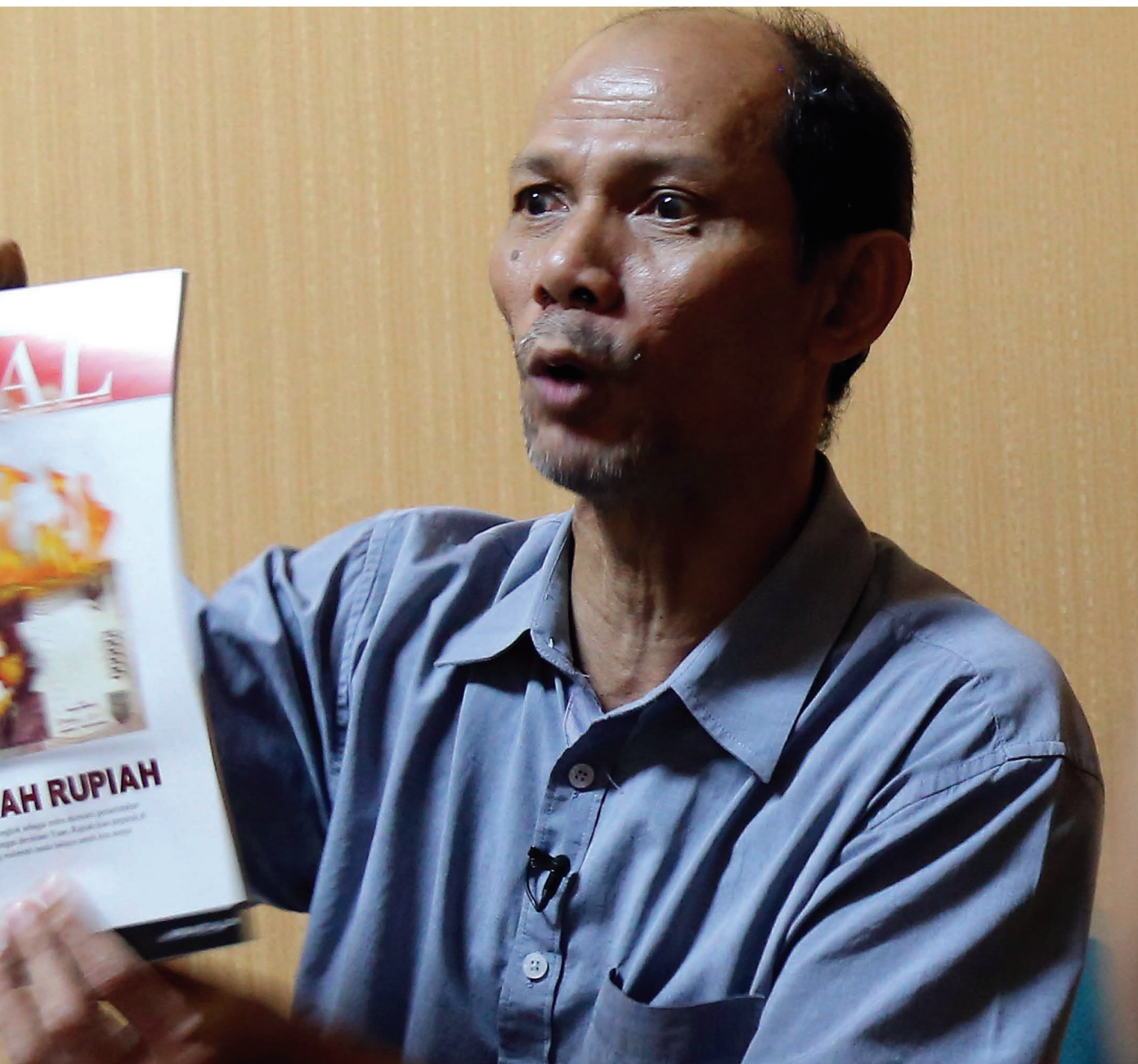
Jokowi sama saja mengulangi apa yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya yang masih dibayangi *track neoliberal*, dan itu tidak sungguh menjawab Trisakti. Kalaupun katanya saat ini slogannya adalah Nawacita, maka slogannya sudah dibajak kekuatan investasi asing. Jadi telah terjadi pembajakan atas posisi Nawacita yang bersemangat Trisakti, ber-roh revolusi mental tapi bermuatan Neoliberal.

Ini tercermin di investasi asing dalam

pembangunan infrastruktur?

Pembangunan infrastruktur yang mengandalkan investasi asing sejatinya adalah invasi model baru yang dilakukan oleh asing pasca Indonesia merdeka dan pasca Perang Dunia II. Dahulu keberadaan VOC adalah sejarah invasi yang dilakukan oleh Belanda. Sekarang zaman ekonomi baru dimana penjajahan dilakukan mengatasnamakan perusahaan-perusahaan asing yang mendominasi





lewat kekuatan ekonomi.

Penjajahan ini kemudian dilegalkan melalui UU, yakni UU No.24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dengan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Sehingga menyebabkan bukan intensif padat karya, akan tetapi intensif padat modal yang melahirkan ketimpangan.

Apakah efektif kebijakan bebas

pajak untuk menarik dolar masuk ke Indonesia?

Ketika Kemenkeu mengeluarkan kebijakan bebas pajak atas manfaat investasi, maka sesungguhnya dia tidak memperbaiki iklim investasi. Tentang hal itu maka sesungguhnya bagi saya kita tidak hanya sekedar menggelar karpet merah tetapi juga telah memberikan kenyamanan, padahal mereka tidak bisa mengatasi nilai tukar rupiah. Terbukti setelah

Jokowi mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1, tidak memperbaiki nilai tukar. Terbukti kepercayaan asing pun tidak ikut membaik. Ini sama halnya kita berhadapan pada posisi tranfusi yang bisa terjadi setiap saat. Setiap saat mereka bisa memberi darah ke dalam tubuh kita, dan setiap saat mereka bisa menarik darah dari dalam tubuh kita. Bahkan dengan infrastruktur yang dimodali asing, bukan hanya sekedar darah yang



bisa masuk. Pembuluh darahnya pun bisa mereka matikan kapan saja dan hidupan kapan saja. Itu bahayanya!!!

Berarti, apakah kita harus menolak investasi asing?

Kita bukan dalam posisi menolak. Akan tetapi semestinya kita duduk bareng dengan posisi tangan kita tidak di bawah mereka. Investasi asing tidak boleh seperti kofenan-kofenan yang menjerat leher kita. Sejak tahun 2001 sampai sekarang, Pemerintah RI tidak

pernah membongkar kofenan-kofenan atau perjanjian-perjanjian yang menjerat leher kedaulatan Indonesia. Saya pernah bertanya kepada Komisi XI DPR-RI, BPK, tentang hal itu, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah menjawab berapa banyak perjanjian-perjanjian utang RI dengan ADB atau dengan investor lainnya yang menjerat leher kedaulatan. Termasuk ketika pada 15 Februari 2005, Presiden SBY memberikan jaminan investasi Singapura di

RI. Atau pun ketika pada 23 April 2010, Boediono sebagai Wapres memberikan jaminan investasi AS di Indonesia. Pada 10 November 2010 RI kemudian menyepakati perjanjian dengan AS tentang Comprehensive Agreement.

Salah satu cara pemerintah meredam krisis adalah dengan mengucurkan Dana Desa.

Dana desa, persoalan pokoknya menurut saya hanya dilihat dari



perspektif kuantitas bukan kualitas. Sehingga ketika mau dicairkan, mereka berhadapan dengan masalah APBDesa yang semestinya berpijak pada rencana kerja pemerintah desa, yang berpijak juga pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang desa. Emangnya bisa masyarakat desa berpikir semua itu?

Berarti ini program yang dipaksakan?
Saya tidak melihat program

ini memaksakan. Saya melihat permasalahan ini harus ditekuni, dan tidak dengan jalan keluar dengan posisi instan. Ini membutuhkan pembelajaran, karena logika sederhananya, lihat saja struktur pendidikan di desa dan di kota. Lihat saja struktur kemiskinan di desa dan di kota. Lihat saja struktur ketenagakerjaan. Dari itu menunjukkan strata penduduk desa.

Kalau dibandingkan dengan program BLT yang lalu?

Mohon dikaji baik-baik. Gagasan awal BLT adalah gagasan Bank Dunia. Tertuang dalam perjanjian Pemerintah RI dengan Bank dunia NO:4712DISND, berakhir Desember 2003. Latar belakangnya adalah masyarakat tidak marah ketika subsidi dicabut. Saya punya buktinya, pernah berdebat di TV, dan Bank Dunia tidak bicara apa-apa, kemudian mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Karena saya berhasil membuktikan bahwa masyarakat dibodohi. Saya ingin mengatakan bahwa anda jangan terkecoh, bahwa anda sedang dijadikan pengemis di rumah anda sendiri. BLT menjadikan anda pengemis di rumah anda sendiri. Anda sedang dirampok oleh mereka, dan saya punya dokumennya. Saya bukan penganut teori konspirasi. Saya katakan gugurkan saya dengan dokumen. Ketika anda memberikan BLT maka sejatinya anda memiskinkan masyarakat anda.

Lalu jalan keluarnya seharusnya bagaimana?

Orang desa butuh pekerjaan. Pemulung saja mengatakan lebih baik saya menerima pekerjaan daripada saya menerima BLT. Terbukti pencabutan subsidi tahun 2005, 2008, BLT tidak bisa menyelesaikan kemiskinan, walaupun standar kemiskinan sudah diturunkan. BLSM yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada APBNP 2015 dan nanti APBN 2016, juga tidak akan menyelesaikan akar masalah. Ini seperti filosofi Adam Smith yakni memberikan sisa-sisa makanan kepada orang miskin.

Mengapa kita mau dibodohkan dengan merendahkan harkat dan martabat dengan cara seperti itu. Padahal secara konstitusi UUD ada di pasal 34, yang fungsinya sebagai *buffer policy*, *buffer strategy*. Artinya BLT itu untuk mereka yang tua renta tak berdaya karena filosofinya seperti itu.

Apakah termasuk juga Program Kartu Indonesia Pintar?

Sama saja, karena sesungguhnya yang bisa menerima bantuan cuma tua renta, yang sudah tidak berdaya hidupnya. Fakir, miskin dan anak terlantar itu tanggungjawab Negara mengurusnya. Anak terlantar memang tidak punya orang tua memang kesulitan, dia menjadi anak masyarakat. BLT tidak memusuhi kemiskinan, tidak mengatasi kebodohan, dan justru meluluhlantakan harkat dan martabat. Anda mau kita memamerkan kemiskinan? Masa kemiskinan dipamerkan! Orang yang mulia adalah orang yang tidak memamerkan kemiskinan tapi dia sadar adanya kemiskinan.

Kembali ke tema dana desa. Masih ada beberapa daerah yang belum berani mengoptimalkan, menurut anda efektifkah ini?

Informasi yang saya tahu, pekan lalu 3 Kementerian rapat yakni Keuangan, Mendagri, dan PDT. Kesimpulannya, agar dana itu segera dicairkan berhadapan dengan posisi keterburu-buruan. Seolah-olah mencairkan dana desa dapat dengan cepat mengatasi kemiskinan dan keterpurukan. Untuk pertimbangan itu hasil rapat menyetujui pentingnya untuk tidak buru-buru mencairkan, tetapi dengan melihat rencana pembangunan desanya, rencana kerja pemerintah desa, dan APBDesa. Untuk bisa seperti itu mencul kalimat pentingnya pendampingan. Bukan pendampingan Kejaksaan itu agar mencegah tipikor, yang dibutuhkan adalah pendampingan untuk membangun perencanaan. Dan jarang yang berhasil membuat perencanaan dengan baik dan benar. ◦

Salah Alamat Berbuah Kalah

Di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (29/9), Jampidsus Widyo Pramono terlihat agak gusar.

Beberapa kali, tangannya memainkan telepon genggamnya. Entah apa yang ia lakukan. Matanya sesekali menyorot tajam kepada Hakim yang tepat berada di depannya. Pun sikap yang sama ditunjukkan orang di sebelahnya, Direktur Penyidikan Jampidsus, Maruli Hutagalung.

Raut ketegangan di wajah mereka tak bisa disembunyikan selama sidang praperadilan PT Victoria Securites Indonesia (PT VSI) selama tak kurang dari 60 menit itu.

Ya, di ruang sidang siang itu sedang berlangsung sidang praperadilan yang diajukan PT VSI untuk kasus kesewenang-wenangan Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. PT VSI menganggap lembaga pimpinan HM Prasetyo itu salah melakukan pengeledahan dalam kaitan kasus penjualan hak tagih (cessie) milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Ketegangan di raut muka dua petinggi Korps Adhyaksa itu kian menjadi ketika Hakim mengatakan kata "memutuskan...". Mereka terdiam tanpa sepele katapun keluar dari mulut mereka.

Mereka seolah tidak percaya dengan putusan yang baru saja dibacakan hakim tunggal Ahmad Rifai bahwa pengeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejagung di kantor PT VSI yang terletak di Panin Tower, Senayan City Lantai 8, Jakarta, dinyatakan tidak sah.

Hakim tunggal Achmad Rifai memutuskan bahwa pengeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejagung di kantor PT VSI pada 12-14 dan 18 Agustus 2015, telah melanggar Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHP), atau dinyatakan tidak sah. Pengeledahan yang dilakukan Kejagung batal demi hukum, lantaran tidak sesuai dengan izin Penetapan Pengeledahan yang dikeluarkan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Apa alasan dibalik putusan hakim

Hakim Achmad dengan seksama mendengar pemaparan dua saksi fakta dari pihak Termohon, dalam hal ini Kejagung, satu ahli dari PT VSI, selaku Pemohon dan tiga ahli dari pihak Termohon.

Menurut penyidik Kejagung, Muhammad Zubair, yang dijadikan saksi fakta oleh pihak Termohon, pengeledahan yang dilakukan Kejagung memang tidak sesuai dengan izin pengeledahan yang dikeluarkan Kepala PN Jakpus.

Dalam surat penetapan tersebut, tertulis dua lokasi yang diperbolehkan untuk digeledah, yakni kantor Victoria Securities International Corporation (VSIC), yang bertempat di Panin Bank Center lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Senayan, Jakarta. Kemudian, juga diperuntukan untuk PT Victoria Securities (VS) di Gedung Panin Bank, Senayan lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Senayan Jakarta.

Tapi yang geledah, menurut pengakuan Zubair justru kantor PT VSI yang terletak di Panin Tower Senayan City, Jalan Asia Afrika, Jakarta. Lokasi yang berbeda dengan surat penetapan pengeledahan.

Akan halnya saksi fakta Ridwan, karyawan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia mengatakan bahwa PT VSI adalah badan hukum yang berbeda, baik itu dengan VSIC atau dengan PT VS. Dia menunjukkan bukti itu dengan menyodorkan data berupa Anggaran Dasar atau Akta Perusahaan. Data yang disodorkan Ridwan itu sebenarnya



Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Widyo Pramono mengikuti sidang putusan Praperadilan PT Victoria Securites Indonesia (PT VSI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/9).

adalah untuk menghilangkan anggapan bahwa VSIC, PT VS dan PT VSI adalah perusahaan yang berafiliasi satu sama lain.

Adnan Paliadja, salah satu ahli dari pihak Termohon mengatakan memang penyidik bisa saja menggeledah sebuah tempat yang tidak tercantum alamatnya dalam surat penetapan pengadilan. Namun hal itu hanya dapat dilaksanakan jika dalam kondisi mendesak, sesuai dengan Pasal 34.

Hakim Achmad juga mendengar seluruh pendapat hukum yang dipaparkan dari empat ahli, baik dari PT VSI maupun dari



Kejagung. Intinya, dengan merujuk pada KUHAP Pasal 33, para ahli itu menegaskan bahwa setiap penggeledahan bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan lokasi penggeledahan tentunya harus sesuai dengan penetapan Pengadilan.

Seluruh penjelasan dari saksi fakta dan ahli yang hadir saat itu dijadikan dasar putusan yang memenangkan PT VSI. Di samping itu, Hakim Achmad juga menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan tim penyidik Kejagung pada 12-14 Agustus 2015 juga tidak sah dan sekaligus memerintahkan untuk mengembalikan semua barang yang telah disita sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BAP). Pihak Kejagung pun tidak diperkenankan untuk menggunakan barang-barang yang sempat disita itu sebagai barang bukti.



Namun ada satu permohonan PT VSI yang ditolak Hakim Achmad yakni ihwal uang ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada Kejagung. PT VSI menganggap penggeledahan Kejagung tersebut telah menurunkan kredibilitasnya sebagai perusahaan jasa sekuritas.

Alasan penolakan itu karena PT VSI tidak merinci nominal kerugian, yang jika dihitung jumlahnya sesuai dengan permohonan.

Dan sidang itu pun usai setelah hakim meninggalkan kursi dengan diiringi dengan rasa kecewa dari Jaksa Widyo. Dia mengatakan bahwa putusan Hakim Achmad tidak menyentuh ke substansi kasus. Dan korps-nya akan melakukan perlawanan hukum lanjutan.

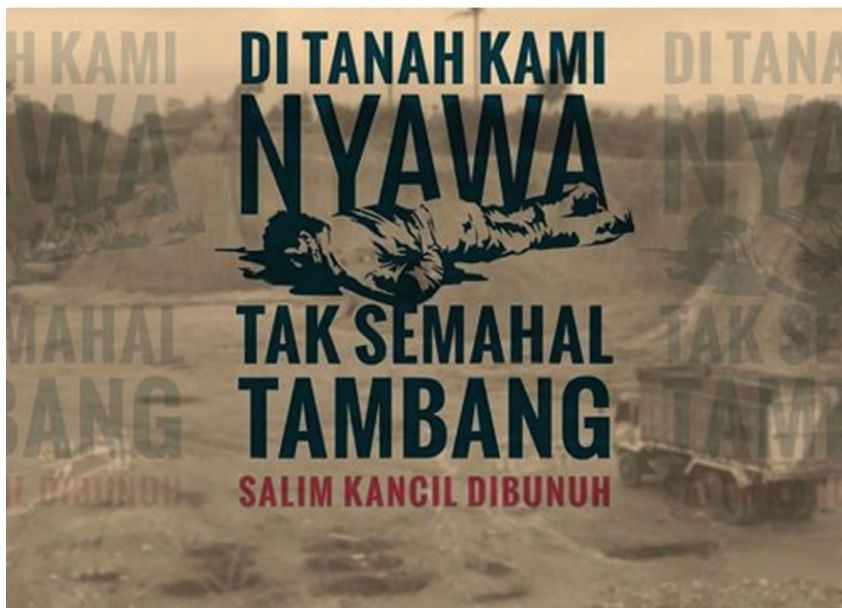
Pria yang menggeser posisi Arminsyah dari kursi Jampidsus itu menekankan, bahwa putusan praperadilan tidak akan menghentikan langkah Kejagung untuk tetap menyidik kasus Cessie BPPN lainnya.

Jaksa Agung Gegabah

Tak lama setelah sidang selesai, sebuah respon datang dari Gedung Bundar. Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw akan meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi.

“Nanti ketika rapat dengan komisi III pak Jaksa Agung, Komisi pasti akan bertanya mendetail, kenapa yang kita anggap hebat dalam penyidikannya kok banyak sekali kegagalan yang mengakibatkan kekalahan dalam praperadilan. Itu Jaksa Agung harus mau dan bisa bertanggungjawabkan itu di depan Komisi Hukum,” ucapnya, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (29/9).

Wenny menilai apa yang diputus hakim harusnya membuat malu Kejagung dan jadi pelajaran agar tidak lagi gegabah dan independen dalam menganalisis sebuah kasus. “Tentu hakim punya satu kemandirian, apa yang diputuskan itu pasti berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Kalau memang penggeledahan dan penyitaan ada syaratnya, sehingga bila tidak ada penetapan pengadilan, tidak memberitahu Lurah/RT setempat, itu salah. Sehingga, bila ada syarat yang dilanggar di dalam penggeledahan maupun penyitaan ini pasti bermasalah,” tambahnya. *Nebby Habiburrahman*



Kriminolog: Ada Yang Gerakkan Pelaku Pembunuhan Salim Kancil

Menanggapi pembantaian Salim Kancil di tragedi Pertambangan di Lumajang, Kriminolog Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Krist Klaiden, mengatakan pembantaian secara sadis yang tidak manusiawi dilakukan banyak orang, bukanlah murni yang dilakukan orang biasa.

Sebab, menyetrum, menggergaji manusia, sangatlah diluar pemikiran orang-orang biasa. Tentu ada penggerak yang terus melakukan penekanan. Dan sudah pasti, disusupi beberapa preman.

Dalam hal ini, untuk mencari siapa aktor dibalik tindakan anarkis itu, polisi cukup melakukan penutupan pertambangan. Siapa yang paling aktif memprotes, disitulah ada dugaan muncul aktor dibalik semua itu.

“Kenapa sampai tega membunuh secara sadis? Pasti ada penekanan-penekanan yang luar biasa,” ujarnya kepada Aktual.com, Rabu (30/9).

Di tempat berbeda, salah satu pekerja tambang pasir di wilayah Lumajang (di luar Pasirian), Winarto, mengatakan bahwa para pekerja tambang pasir di Lumajang, hampir semuanya adalah pekerja bernyalai yang berdomisili sebagai penduduk

setempat.

Tidak dipungkiri, sebagian adalah preman yang tak punya pekerjaan, dan memilih bekerja di tambang.

Ketika lahan tempat dia bekerja mencari nafkah diusik, mereka tidak segan-segan untuk memberontak termasuk membunuh untuk mempertahankan lahannya.

Warga yang pro adalah warga yang terkena dampak positif, seperti pemilik truk, tukang portal dan sebagainya. Sementara warga yang kontra, biasanya warga yang tidak terkena dampak, seperti petani dan sebagainya.

“Saya tidak berbicara soal Salim Kancil. Ini tempat tambangnya juga berbeda. Bukan di Pasirian. Di luar Pasirian. Memang, biasanya ada banyak orang-orang yang mengaku atas nama masyarakat pecinta lingkungan atau apalah, yang kerap memprotes. Tetapi setelah ditutup uang, ya sudah selesai begitu saja. Bagi mereka yang mendapatkan jatah uang sedikit, ya terus memprotes. Jadi tidak tulus murni mencintai lingkungan. Saya katakan lagi, saya tidak berbicara soal Salim Kancil,” lanjutnya. /Sukardjito-Ahmad H. Budiawan

Berkas Tahap Dua, Abraham Samad Tetap Tak Ditahan

Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) telah melakukan proses tahap dua perkara pemalsuan dokumen, yang menjerat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Amir Yanto mengatakan, bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menerima pelimpahan tahap dua yakni barang bukti dan tersangka dari Polda Sulselbar.

“Saya sudah dapat laporan dari Aspidum Kejati Sulsel hari ini benar ada pelimpahan tahap II perkara AS,” kata Amir, Selasa (22/9) malam.

Meski proses tahap dua telah dilakukan, Amir menegaskan pihak Kejati Sulsel tak melakukan penahanan terhadap Abraham Samad. “Dia tidak ditahan, sesuai pertimbangan objektif dan subjektif ya,” ujar Amir.

Kejagung, lanjut Amir tetap meminta pihak Kejati Sulsel tetap melanjutkan penegakan hukum secara profesional. Hal ini agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Jadi kalau memang sudah diteliti nanti berkasnya, jika bisa dilimpahkan langsung ke pengadilan. Kita akan lihat nanti seperti apa. Itu sudah diatur kok dalam KUHAP,” kata Amir.

Polda Sulselbar menetapkan Samad sebagai tersangka pada Selasa, 17 Februari 2015. Dia diduga memalsukan dokumen milik seorang wanita bernama Feriyani Lim, 28 tahun. Samad dituduh membantu Feriyani Lim mencantumkan nama Feriyani dalam kartu keluarganya untuk kemudian digunakan Feriyani dalam membuat paspor.

Atas perbuatan itu, dia dijerat Pasal 263, 264, 266 KUHP dan Pasal 93 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara. /Wisnu-Fadlan Syiam Butho

Empat Tahun jadi Menbudpar, Jero Wacik Diduga Selewengkan DOM Hingga Rp 8 Miliar

Bekas Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik didakwa menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi dan keluarga, hingga mencapai Rp 8.408.617.149.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penuntut umum membeberkan, bahwa pada tahun anggaran 2008, setiap bulan Jero mendapatkan DOM sebesar Rp 300 juta, dengan total satu tahun ialah sejumlah Rp 3,6 miliar. Namun, Jero hanya mencairkan sebesar Rp 2.113.416.302.

Dari jumlah dana yang dicairkan itu, senilai Rp 583.821.400 dipakai Jero untuk keperluan pribadi dan keluarga. Untuk menutupi pemakaian uang itu, Jero memerintahkan anak buahnya membuat laporan sebagai perjalanan dinas.

“Uang DOM yang digunakan untuk keperluan pribadi keluarga terdakwa Rp 583.821.400. Untuk uang yang dipakai terdakwa, Luh Ayu Rusminingsih, Siti Alfiah dan Murniyati Suklani membuat pertanggungjawaban DOM yang tidak menunjukkan keadaan sebenarnya yaitu biaya perjalanan dinas sejumlah Rp 571.121.400 dan pembelian bunga Rp 12,7 juta,” ujar jaksa KPK Dody Sukmono, Selasa (22/9).

Pada tahun anggaran 2009 per tahunnya Jero mendapatkan jumlah DOM yang sama yakni Rp 3,6 miliar. Dia hanya mencairkan DOM tersebut sebesar Rp 1.387.850.000. “Uang untuk keperluan terdakwa sejumlah Rp 169.200.000. Untuk menyamakan, Luh Ayu dan Siti Alfiah menunjukkan pembelian bunga sejumlah Rp 161.100.000 dan pembayaran telepon dan lain-lain sejumlah Rp 8.100.000,” ujar jaksa.

Ketiga, tahun anggaran 2010 dengan jumlah DOM yang sama, Jero mencairkan sebanyak Rp 1.956.200.000. “Uang untuk keperluan pribadi terdakwa mencapai Rp 252.746.434. Namun Luh Ayu



dan Siti Alfiah membuat laporan pertanggungjawaban untuk pembelian bunga sejumlah Rp 206.800.000 dan pembayaran telepon dan lain-lain sejumlah Rp 45.956.434.”

Keempat, tahun anggaran 2011, alokasi DOM adalah Rp 3,6 miliar. DOM yang dicairkan sesuai kuitansi yang ditandatangani Jero selama 2011 sejumlah Rp 1.880.062.500. “DOM yang digunakan untuk keperluan pribadi keluarga sejumlah Rp 65.320.513. Sedangkan Luh Ayu dan Siti Alfiah membuat laporan yang tidak sebenarnya yaitu untuk pembelian bunga sejumlah Rp 39.102.800 dan pembayaran telepon dan lain-lain Rp 26.217.713.”

Selain menggunakan uang DOM 2008-2011, Jero juga meminta Luh Ayu agar memperhatikan keperluan keluarganya. Menariknya, lantaran perintah tersebut Luh Ayu sampai menggunakan sebagian uang DOM yang dikelola selama periode 2008-2011, untuk membayar biaya keperluan keluarga Jero seperti pijat refleksi, potong rambut dan salon, transportasi panggil petugas medis dan laboratorium, transportasi dan pembelian makanan untuk keluarga terdakwa di kantor, transportasi untuk mengambil makanan diet Jero.

“Selain itu uang tersebut juga digunakan untuk makan malam staf dan ajudan yang lembur, transportasi mengantar berkas ke kediaman Jero yang ketinggalan, pembayaran kartu

kredit ANZ atas nama Jero, membeli peralatan persembahyangan/sesaji dan keperluan keluarga Menteri lainnya.”

Lantaran keperluan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, maka Luh Ayu Rusminingsih, Siti Alfiah dan Murniyati Suklani membuat bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang DOM tidak sesuai fakta sebenarnya, yaitu antara lain berupa biaya perjalanan dinas, biaya protokol, operasional Menteri melalui ajudan Menteri dan pembelian bunga. Hal itu dilakukan hanya sebagai formalitas kelengkapan dokumen penggunaan DOM.

“Pembuatan dokumen formalias ini dilakukan dengan cara membuat dokumen yang tidak benar yang menunjukkan keadaan seolah-olah dikeluarkan oleh penyediaan barang/jasa tertentu termasuk bukti-bukti perjalanan dinas berupa tiket dan tagihan hotel.”

Pada Oktober 2011, politikus Partai Demokrat itu kemudian memerintahkan Luh Ayu Rusminingsih untuk memusnahkan seluruh bukti pertanggungjawaban DOM yang dipegang atau disimpan Siti Alfiah. Menurut Jaksa, Jero menyelewengkan DOM mulai tahun anggaran 2008-2011 yang memperkaya diri sendiri senilai Rp 7.337.528.802 dan untuk keluarga Jero Rp 1.071.088.347. Perbuatan Jero itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8.408.617.148.

/Wisnu-M Zhacky Kusumo



LANGKAH-LANGKAH OJK MENGHADAPI BADAI EKONOMI GLOBAL

Ditengah badai ekonomi global, tiga institusi keuangan bekerjasama untuk menyiasati agar perekonomian ekonomi Indonesia dapat bertahan dan tidak terpuruk lebih dalam. Pemerintah melalui kementerian keuangan selaku otoritas fiskal mengeluarkan beberapa paket kebijakan. Begitu pula dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Lalu apa yang langkah-langkah Otoritas Jasa Keuangan menghadapi badai ekonomi global yang menghampiri Indonesia? Berikut wawancara Aktual dengan ketua OJK Muliaman D Hadad.

Beberapa waktu lalu, presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pertama untuk menghadapi penurunan nilai tukar rupiah dan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terkait paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, apa yang telah dilakukan OJK menurut fungsinya?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun ke-4 terus memperbaiki tugas pengawasan. Apalagi dalam kondisi perekonomian saat ini, OJK melakukan pengawasan berbagai macam kebijakan keuangan yang lebih besar. Mulai dari para pelaku usaha hingga industri keuangan terutama dalam hal pembiayaan. Beberapa paket kebijakan kita buat bertujuan memberikan kelonggaran bagi lembaga keuangan agar bisa membiayai kredit usaha, terutama kredit UMKM. Kemarin kita sudah keluarkan 36 paket kebijakan. Kebijakan ini tentu tidak mudah karena UMKM sebelumnya kurang diperhatikan. Oleh karena itu banyak kebijakan OJK yang kemarin kita dorong untuk memberikan pembiayaan pada mereka.

Apa saja 36 paket Kebijakan untuk memperkuat pembiayaan bagi UMKM dan perusahaan dalam negeri?

Sebanyak 36 paket kebijakan tersebut intinya memberikan keringanan atau relaksasi, misalnya keringanan beberapa aturan Bank untuk memberikan kredit terhadap

UMKM. Selain itu, OJK juga mendorong UMKM dan perusahaan untuk dapat mengakses pasar modal. UMKM dan perusahaan di Pasar modal belum banyak yang terkenal, belum banyak perusahaan yang *go public* atau IPO, baru sekitar 400an sampai 500an perusahaan saja. Jumlah ini kurang sekali, makanya kita dorong agar perusahaan-perusahaan menjual sahamnya di masyarakat, biar masyarakat bisa membeli. Kemudian mengeluarkan surat utang. Ini diperlukan untuk membiayai perusahaan-perusahaan itu sendiri. Jadi kalau sulit mendapatkan pinjaman kredit dari Bank, perusahaan itu bisa mengeluarkan surat utang yang dapat dibeli di pasar modal agar bisa tumbuh dan berkembang. Yang agak membedakan, karena belakangan ini kita buka akses UMKM untuk masuk pasar modal. Kita akan persiapkan perusahaan menengah dulu. Jadi yang mikronya belum namun terus kita dorong. Kita kemarin mengeluarkan *buy back* pada siapa saja. Ini juga kita keluarkan sama seperti ini tahun 2013 lalu. Ini kita keluarkan lagi dan ini bersifat temporer sampai kita anggap situasinya kembali normal.

Apakah keadaan ekonomi Indonesia sekarang ini bisa dikatakan krisis?

Ah (ekonomi Indonesia) belum krisis, tapi nampaknya masih *stressing*. Artinya kegiatan ekonomi masih berjalan lancar, ada orang yang panik. Namun, volume usaha

perdagangan menurun omsetnya karena memang pertumbuhan ekonomi yang sedang menurun. Tapi bukan berarti tidak ada aktivitas di level bawah. UMKM justru mengalami peningkatan yang lebih dinamis. Contohnya kredit pada UMKM rata-rata lebih tinggi daripada kredit secara umum, jadi artinya pembiayaan dalam level mikro ini terus meningkat. Namun, OJK akan terus bekerja dengan memperkuat pengawasan supaya industri punya daya tahan terutama bank. Kedua lebih memberikan kontribusi pada perekonomian. Ketiga kita ingin akses layanan keuangan pada masyarakat supaya tidak tertipu.

Apa yang menjadi kendala dalam pembiayaan UMKM?

OJK sedang mencoba mencari cara agar UMKM layak dibiayai kredit perbankan. Kita akan dorong dengan memberikan relaksasi perbankan. Bagi UMKM yang belum layak dibiayai Bank, dalam beberapa waktu saya akan *launching* kebijakan modal ventura. Modal ventura kita dorong terutama untuk pengusaha pemula. OJK akan membentuk beberapa modal ventura dan merevitalisasi kembali modal ventura yang selama ini ada sekitar 30 modal ventura. Ada di beberapa provinsi-provinsi tapi tidak berjalan, yang berubah hanya fungsinya. Dalam modal ventura, OJK tidak memberikan sumbangan ke Negara, tapi memberikan uang di kepemilikan.

Bagaimana porsi Modal Ventura yang aman seperti apa?

Porsi modal Ventura tergantung kesepakatan, tetapi pada umumnya modal ventura tidak mayoritas karena berdasarkan kesepakatan bersama. Pada intinya, pemilik modal bisa ikut membina, mengurus dan memberikan arahan. Ketika usahanya maju, bisa diberikan ke Bank. Banyak

contohnya, kemarin ada anak-anak baru lulus dari ITB. Dia ingin mendirikan bimbingan tes. Tetapi karena ini anak-anak baru ini tidak mempunyai *track record* perbankan, belum punya ini itu. Sehingga tidak bisa masuk bank. Nah ini yang tidak boleh dibiarkan.

Melihat posisi nilai tukar rupiah dari tahun 2014 di level Rp12.000, namun saat ini mencapai posisi Rp14.000, apakah ada pengawasan khusus terhadap bank-bank tertentu akan ancaman kolaps?

Kita menciptakan dulu ciri khas dari perbankan Indonesia. Di Indonesia, perbankan dilarang memberikan kredit untuk beli saham Bursa Efek Indonesia. Bank juga tidak boleh memiliki saham pada assetnya. Jadi tidak boleh nih, bank bermain gorang-goreng saham di Bursa.

Kalau orang-orangnya (pejabat) perbankan apakah diperbolehkan bermain bursa?

Bank tidak boleh memberikan kredit untuk bermain saham, sehingga ketika saham jatuh, bank tidak terkena dampaknya. Tidak seperti China kemarin, perbankan diizinkan untuk memberikan kredit pasar modal, namun ketika saham rusak bank jadi terkena dampaknya. Nah di Indonesia, peraturan tersebut menjadi tembok itu pertama. Ciri khas kedua perbankan Indonesia adalah efeknya terhadap pengaruh nilai tukar rupiah. Pada umumnya bank di Indonesia lebih banyak memiliki dolar daripada utang dalam bentuk dolar. Jadi *nett*-nya positif atau istilahnya 'long dolar'. Jadi penurunan nilai tukar rupiah mau berapa ya gak masalah. Sehingga berapapun nilai tukar Rupiah, bank tidak akan kena.

Lalu, bagaimana yang membuat perbankan kolaps?

Bank kemungkinan terganggu karena memburuknya pinjaman kepada nasabah, atau Non Performing Loan (NPL)-nya meningkat. Hal itu bisa saja terjadi karena perekonomian sedang lesu, pengeluaran bayar kredit



meningkat, likuiditas terganggu. Ada patokan dalam aturan OJK, setiap pemburukan kredit bank harus menyisihkan pencadangan atau mencadangkan utang yang sifatnya ragu-ragu. Misalnya, tagihan yang ragu-ragu tersebut harus di-*backup* sehingga ada peng-*cover*-an terlebih dahulu. Nah, di perbankan Indonesia mereka sudah punya cadangan tersebut.

Dalam stress test yang dilakukan BI pada awal tahun, disebutkan bahwa ketika nilai tukar dolar terhadap rupiah mencapai Rp15.500 akan ada 7 korporasi yang bangkrut, bagaimana OJK melihat hal tersebut?

Ya itukan hitung-hitungan angka

dari BI. Misalnya kalau kita punya gaji segini semisal Rp80 juta kalau terjadi hal tertentu bagaimana. Sehingga kita buat semacam ujicoba mulai dari asumsi sangat ekstrim, sampai asumsi sangat sederhana. Karena itu namanya juga asumsi, kita bisa buat angka berapa saja. Daya tahan perbankan terlihat dari angka kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). CAR di atas angka 20 itu menunjukkan daya tahan perbankan bagus dalam mengasorbsi kemungkinan gejala pelemahan rupiah. Modal CAR 20% itu besar sekali, jauh lebih dari batas minimal 8%. Oleh karena itu kemarin ada beberapa bank yang kita panggil untuk menambah modal, walaupun masih tinggi

Pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada pengurangan jam kerja atau PHK secara tersebut, bagaimana OJK melihat hal tersebut?

Pelemahan bukan hanya terjadi di bursa. Pada intinya pelemahan daya beli pada akhirnya perusahaan akan mengurangi jam kerja dan mengurangi karyawan. Itu memang sudah terjadi namun jangan sampai terlalu lama dan berlarut-larut. Nanti mereka atau perusahaan lain bisa merekrut lagi. Memang kita harus mempersiapkan diri dengan asumsi seolah-olah pelemahan bakal lama, istilahnya harus konservatif. Bagaimana kalau pelemahan ini berlangsung lama?, Ya barangkali kita harus mempersiapkan diri. Terutama terhadap kualitas pinjaman tadi. Kalau untuk pasar modal dan nilai tukar saya gak khawatir, tetapi untuk kualitas aset kreditnya, yang harus kita terus pantau secara ketat, mitigasi dan sebagainya. Makanya kemudian pemberian kredit kepada UMKM menjadi lebih penting untuk menutupi kredit di tempat lain ini. Karena UMKM itu NPL-nya kecil, lancar, dan bunganya lumayan tinggi.

Bagaimana efektifkah salah usaha pemerintah (buyback) untuk mengatasi anjaknya saham-saham di Bursa?

Ada dua hal, pertama mengenai peraturan *buyback* saham. Itu dikeluarkan oleh OJK, kita sudah 3 kali mengeluarkan kebijakan baru. Di situ kita memperbolehkan perusahaan yang sudah menjual sahamnya di lantai bursa bisa membeli sahamnya kembali tanpa melalui RUPS. Itu dilakukan agar sahamnya tidak terus merosot. Pasalnya, kalau saham dibiarkan terus turun, mereka akan merugi dari sisi kepercayaan market, padahal tidak begitu di dalam korporasi tersebut. Namun kebijakan itu sifatnya sementara, sampai situasi kita nyatakan normal kembali. Jadi *by nature*, mungkin bisa 1 atau 2 tahun. Itu tidak hanya dimanfaatkan oleh BUMN, oleh swasta juga bisa. Bahkan saat ini sudah ada

beberapa perusahaan swasta yang memanfaatkan itu.

Untuk melakukan buyback, darimana anggarannya, apakah diperbolehkan menggunakan utang?

Anggaran untuk melakukan *buyback* saham tentu dari mereka anggaran mereka sendiri. Seperti BUMN misalnya, mereka kan punya banyak duit. Dia perjualbelikan sahamnya, sehingga nilainya berkurang di pasar. Nanti dia bisa beli kembali. Terkait *buyback* menggunakan utang itu tidak diperbolehkan. Dalam beberapa waktu ini kan bursa sempat naik 1% kemudian turun terus. Akan lebih efektif jika melakukan pembelian kembali saham. Karena kalau kita *buyback*, orang yang ingin menjual, akhirnya tidak jadi. Jadi rugi dia kan. Sebab, kalau dia mau beli lagi jadi mahal. *Buyback* ini menghambat orang untuk menjual saham. Sehingga kemudian pasar lebih menjadi tenang. Dari sisi pemilik perusahaan, dia mengurangi merosotnya nilai perusahaan. Dari sisi stabilitas yang dia melarang orang untuk menjual. Karena orang jual kalau dia mau beli lagi harga sudah naik.

Nilai tukar rupiah sekarang melebihi level Rp14.000, apa yang akan dilakukan OJK?

OJK tupoksinya adalah mengatur dan mengawasi lembaga keuangan. Saya lebih melihat, jangan sampai perbankan itu kolaps atau jangan sampai perbankan tidak memberikan kredit kepada masyarakat. Kalau itu terjadi, ekonomi jadi mati. Supaya mereka mau memberikan kredit kan perlu kelonggaran-kelonggaran tertentu. Kemarin, paket yang saya keluarkan pada dasarnya memberikan kelonggaran itu. Target 12-13% insya Allah bisa jalan.

Terkait dua kasus yang ditangani OJK, seperti triple A sama M bagaimana perkembangannya pak?

Itu kan ranah pidana umum ya, karena itu penggelapan dan penipuan. Triple A masih ditangani kepolisian. Keduanya sudah ada di kepolisian. Jadi

kita laporkan ke kepolisian dan sedang ditangani. Triple A ada beberapa bank BPD, BPD Ambon, sama ada 1 lagi di Surabaya. Mereka yang mengalami kerugian sudah kita minta untuk menutupi kerugian dengan modal yang dia miliki. Begitu pula dengan banknya, diproses hukum penipuannya.

Menjelang akhir tahun, apa target yang tersisa di 2015 ini?

Target di 2015 ada yang belum kelar. Pengawasan akan terus dilanjutkan. Terutama pengawasan pada konglomerat. Kita identifikasi ada sekitar 50 grup keuangan yang harus diawasi secara baik. Ini akan terus kita lakukan. Kemudian ada kebijakan-kebijakan lain, terutama soal modal ventura dan lain sebagainya dalam waktu dekat akan kita keluarkan. Misalkan asuransi pertanian. Kita juga *launching* gerakan menabung masyarakat. Artinya menumbuhkan budaya menabung. Dulu waktu saya muda itu ada Tabanas, sekarang diperkenalkan produk OJK yakni simpanan pelajar (Simpel). Menabungnya tidak hanya untuk pelajar tapi juga untuk ibu RT, masyarakat. Sehingga kalau pemerintah ada program beasiswa, Indonesia pintar, Indonesia Sehat. TransfERNYA melalui buku tabungan.

Beberapa waktu lalu Kejagung membuka kasus lama seperti cessie BPPN, sebagai fungsi pengawasan apa yang dilakukan OJK?

Itu kan sudah diperiksa polisi, ya silakan saja, apalagi kan delik pidana umum. OJK itu kan kalau ada duit di tindak pidana keuangan. Jadi mengikuti UU Perbankan dan UU Pasar Modal. Kalau deliknya penipuan atau pidum biar polisi yang bertindak.

Bagaimana kalau bukan delik penipuan. Jadi antara kasus jual beli BPPN dan pembeli. OJK tidak berusaha untuk melindungi anggotanya?

Saya belum tahu betul detail kasusnya. Tapi kalau kasus jual beli itu malah urusan perdata. Biarkan mereka menyelesaikan secara sendiri. ◦

Pidato Yellen Belum Pengaruhi Rupiah

Perdagangan rupiah pada Senin (28/9) menguat 28 poin atau 0,19% ke Rp14.665/USD.

Berbeda dengan mata uang di Asia Tenggara lainnya yang cenderung melemah, yaitu dolar Singapura (-0,03%), ringgit Malaysia (-0,19%), dan Baht Thailand (-0,15%). Mata uang di Asia Tenggara selain rupiah yang menguat adalah peso Filipina (+0,01%).

“Apalagi juga ketika kami sampaikan Rupiah sudah sangat terlalu *undervalue* juga tampaknya tidak terlalu dihiraukan, di mana Rupiah lebih menyukai berada di teritori negatif,” ujar Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada.

Kenyataan pahit yang dihadapi ialah meski Bank Indonesia mencoba mengintervensi dengan



mengelontorkan cadangan devisa hingga Rp65,9 triliun dalam dua bulan terakhir, nilai tukar rupiah masih terus merosot. Pidato Yellen pun juga tidak cukup kuat menahan pelemahan laju Rupiah.

“Padahal telah jelas bahwa Yellen mempertimbangkan kenaikan di akhir tahun ini bukan dalam waktu dekat ini,” kata dia. /Arbie Marwan

Resmi: Pemerintah Tak Jadi Turunkan Harga BBM Sampai Awal Tahun



Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan untuk tidak merubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meski saat ini harga minyak dunia tengah merosot.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, Pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan harga guna menjaga kestabilan perekonomian dan ketenangan bisnis.

“Keputusan pemerintah jaga kestabilan perekonomian dan ketenangan bisnis, dan perencanaan.

Pemerintah tetapkan harga BBM tetap di Rp7300 untuk Premium penugasan (non Jamali) dan Rp6900 untuk solar. Tetap. Ga berubah,” kata Wirat usai Rapat Pimpinan dengan Menteri ESDM di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu (30/9).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut akan diberlakukan sejak esok 1 Oktober 2015 Hingga awal Januari 2016 mendatang.

“Itu keputusan pemerintah selama tiga bulan ke depan supaya dunia bisnis punya kepastian,” ujarnya.

Ia menyebutkan, formula yang dipakai dalam menetapkan harga ini menggunakan rerata Means of Plates Singapore (MOPS) USD 66,71 per barel untuk Premium dan USD 61,26 per barel. Sementara untuk kurs, Pemerintah mematoknya dengan rata-rata kurs Rp13708 per USD.

“Sekarang ketetapan tiga bulan. Artinya Januari lagi baru dievaluasi,” tutupnya. /Arbie Marwan

Divestasi Saham Freeport Melalui Pasar Modal Bisa Rugikan Negara

Pengamat Energy Watch Mamit Setiawan menilai divestasi saham PT Freeport Indonesia sebaiknya tidak dilakukan dengan mekanisme pasar modal.

Pasalnya, hal tersebut akan berpotensi merugikan negara.

“Karena ditakutkan akan adanya broker yang mengambil keuntungan dan membuat Pemerintah harus membeli saham PTFI menjadi lebih mahal,” kata Mamit kepada Aktual di Jakarta, Rabu (23/9).

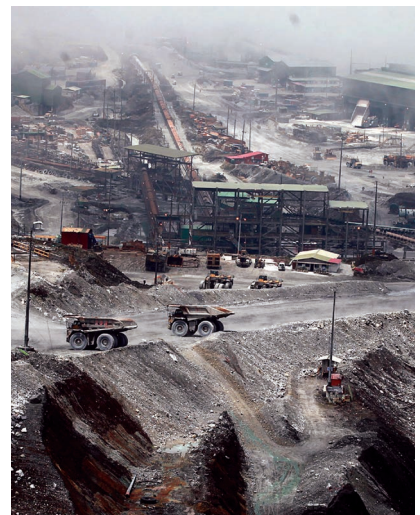
Ia menyarankan pemerintah untuk melakukan divestasi secara tertutup dan memprioritaskan BUMN untuk mengambil porsi kepemilikan saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

“Lebih baik divestasi dilakukan dengan cara tertutup di mana jika pemerintah tidak sanggup maka diserahkan kepada BUMN. Jika tidak bisa maka ditawarkan kepada sindikasi perbankan,” ujarnya.

Menurut Mamit, menawarkan kepada pihak swasta sepatutnya dijadikan opsi terakhir ketika tidak ada lagi pihak Pemerintah yang berminat mengakuisisi saham tersebut.

“Jika tidak ada yang minat baru di tawarkan kepada swasta,” tutupnya.

/Ismed Eka Kusuma-Dhanu Akbar



Tekan Dwelling Time, 44 Peraturan Bakal Disederhanakan

Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya hari ini, Rabu (23/9) mengadakan jumpa pers terkait perkembangan penurunan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Hadir dalam pertemuan tersebut Deputy II Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono.

Dalam pertemuan tersebut membahas empat poin utama yang menjadi target penting dalam upaya penyelesaian kasus dwelling time ini. Salah satunya adalah upaya penyederhanaan peraturan larangan dan pembatasan yang berhubungan langsung dengan impor yang telah dan sedang direvisi.

Agung mengatakan, strategi ini dipakai dalam penghapusan ketentuan yang ganda atau tidak perlu dan pergeseran pengawasan ke tahap post-clearance audit. Adapun peraturan yang akan disederhanakan tersebut terdiri dari 30 Peraturan



Kementerian Perdagangan, 12 Peraturan Kementerian Perindustrian, dan 2 Peraturan Kepala Badan POM.

“Selama ini ijin edar dan ijin impor itu semua dilakukan di Tanjung Priok. Jadi, meskipun ijin impor sudah selesai tapi kadang-kadang ijin edarnya belum keluar. Sehingga barangnya tertumpuk di Tanjung Priok dan tentunya menimbulkan dwelling time juga.

Ini yang kita sebut pre-costume clearances,” jelas Agung di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar dari peraturan larangan dan pembatasan tersebut dapat menurun 23% dari jumlah sebelumnya sebesar 51%, menjadi 28%.

“Dengan kita pangkas peraturan 30, 12, 2 ini kita harapkan informasi jauh lebih cepat diperiksa, jadi lebih cepat keluar dan dwelling time lebih cepat berkurang,” ujarnya.

Sebelumnya, dwelling time merupakan ukuran waktu yang dibutuhkan kontainer impor, sejak kontainer dibongkar dari kapal sampai dengan keluar dari kawasan pelabuhan. Di mana dalam hal ini, Rizal Ramli mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menyelematkan BUMN yang selama ini diduga menjadi target incaran orang di sekitar kekuasaan, serta harus memperpendek dwelling time menjadi 3-4 hari. /Ismed Eka Kusuma-Ludya Annisah

Industri Kretek akan Jadi Fosil jika Cukai Tembakau Naik 22,23 Persen

Setelah memberikan dukungan 100 persen pada pemerintah terpilih, nostalgia petani tembakau sudah saatnya untuk kembali mengkritisi kebijakan tembakau yang dilakukan pemerintah.

“Sudah saatnya menyampaikan kritik keras kepada pemerintah ini bersama elemen masyarakat tertindas lainnya,” ujar pengamat ekonomi-Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng di Jakarta, Senin (2/2).

Pemerintahan hanya menjadikan petani tembakau dan industri kretek sebagai bantakan untuk mengisi kas pemerintahan. Sementara sisi lain industri modal asing dimanjakan dan bahkan diberi fasilitas dan insentif.

Menurutnya, dalam APBNP 2015 target penerimaan cukai tembakau mencapai Rp136,12 triliun, meningkat 22,23% dibandingkan APBNP 2014. Kenaikan sangat besar ini akan mengakibatkan ambruknya



industri tembakau skala kecil menengah.

“Pemerintah melanggar UU Cukai karena tidak meminta pendapat kalangan industri dalam menaikkan cukai,” tegasnya.

Sementara target penerimaan cukai etil alkohol hanya sebesar Rp165,5 miliar, tidak mengalami peningkatan dan penerimaan cukai dan target pendapatan minuman yang mengandung etil alkohol hanya sebesar Rp5,45 triliun (justru

menurun).

“Pemerintah yang konon akan melakukan ekstensifikasi pajak dengan mengenakan cukai pada minuman bersoda dan beralkohol ternyata omong kosong belaka,” terangnya.

Padahal tantangan yang dihadapi petani tembakau dan industri kretek sangatlah berat, terkait ASEAN Economic Community (AEC) pada akhir 2015 mendatang, menghapus secara menyeluruh bea masuk impor tembakau, hasil olahan tembakau dan penerapan standarisasi produk tembakau melalui rezim ASEAN.

“Jika petani tembakau dan kalangan industri kretek tidak mengakhiri nostalgia maka pemerintahan ini akan menjadikan petani tembakau dan industri kretek sebagai fosil dan memuseumkan industri yang mempekerjakan lebih 10 juta rakyat Indonesia,” pungkasnya. /Ismed Eka Kusuma



*Polisi Israel menempati
posisi di atap masjid
Al-Aqsa saat terjadi
bentrokan dengan
warga Palestina di Kota
Tua Yerusalem, Selasa
(15/9) - REUTERS*

PROVOKASI BARU ISRAEL KE AL-AQSA

Rezim Zionis Israel membuat provokasi baru, dengan membiarkan warga Yahudi masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Jerusalem. Warga Palestina cemas, kelompok ultranasionalis Yahudi makin diberi akses untk menguasai tempat suci itu.



Ini adalah peristiwa yang tidak biasa di lingkungan Masjid Al-Aqsa, Jerusalem. Jam baru menunjukkan pukul 7.30 pagi, ketika polisi Israel dengan bersenjata gas air mata, peluru karet, dan granat kejut, menyerbu masuk ke tempat suci Muslim itu. Kejadian yang memicu bentrokan polisi Israel dengan warga Palestina, 15 September 2015, itu menandai babak baru pelanggaran Israel terhadap hak-hak asasi rakyat Palestina.

Juru bicara polisi Israel, Luba Samri, beralasan bahwa polisi masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa untuk membubarkan warga Palestina yang menggelar protes di sana, dan para pemuda itu sudah berada di dalam masjid sejak malam hari. Samri mengklaim, pengunjung rasa melempari polisi dengan batu, kembang api, bata beton, serta sebuah bom molotov. Dua warga Palestina ditahan, sedangkan 26 warga Palestina dan lima polisi Israel cedera ringan dalam bentrokan itu.

Bentrokan itu sempat menimbulkan percikan api di dalam masjid, serta membakar karpet dan tumpukan kayu yang ada di dalamnya. Api dapat dipadamkan, dan kondisi kembali tenang. Namun, fakta bahwa polisi Israel masuk hingga ke dalam masjid itu dianggap sebagai “perkembangan yang sangat berbahaya.” Hal itu dikatakan Direktur Waqf, Azzam Khatib. Waqf adalah yayasan Islam, yang ikut bertugas mengelola kompleks Masjid Al-Aqsa.

Bentrokan ini adalah lanjutan dari bentrokan sebelumnya pada 13-14 September 2015, ketika polisi Israel melindungi warga Yahudi yang ingin masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Direktur Masjid Al-Aqsa Omar Kaswani menyatakan, 80 pemukim Yahudi yang dilindungi polisi Israel menyerang masjid, saat dihadang oleh para relawan Palestina. Menurut media Israel, Menteri Pertanian Israel dari sayap kanan, Uri Ariel, berada di antara rombongan umat Yahudi yang masuk ke kompleks Al-Aqsa.

Reaksi Raja Abdullah II

Reaksi marah pun bermunculan.



Raja Abdullah II dari Jordania secara tegas menyebut tindakan polisi Israel itu bersifat provokasi dan bisa berdampak pada hubungan kedua negara. Pemegang tahta dari Dinasti Hasyimiyah di Jordania ini adalah salah satu pemegang mandat atas Masjid Al-Aqsa, yang merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Jordania menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada 1994.

“Kalau ini terus terjadi...Tak ada pilihan lain, Jordania harus mengambil tindakan,” kata Raja Abdullah, tanpa menjelaskan lebih jauh. Saat terjadi bentrokan di Masjid Al-Aqsa, November 2014, Jordania sempat menarik duta besarnya dari Israel. Mesir pada insiden terakhir juga mengecam langkah Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah berdiskusi lewat telepon dengan Raja Abdullah II, kata juru bicara Kepresidenan Palestina.

Mahmoud Abbas mengecam keras serbuan polisi Israel ke Masjid Al-Aqsa. Abbas menegaskan, tempat seperti Masjid Al-Aqsa merupakan “garis merah.” Katanya, “Kami tidak akan membiarkan serangan pada tempat-tempat suci kami!”

Bentrokan kekerasan ini terjadi setelah kekalahan telak Israel dalam diplomasi internasional. Pertama, pihak Palestina telah berhasil menggalang dukungan mayoritas 119 negara, yang mengizinkan bendera Palestina bisa dikibarkan di markas PBB, New York, pada Sidang Majelis Umum. Resolusi ini tak terbendung, meskipun Israel dan Amerika Serikat menolak resolusi tersebut. Secara simbolis ini adalah kemenangan diplomasi Palestina, dalam meraih apa yang memang sudah menjadi haknya.

Kekalahan kedua adalah kegagalan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam menghalangi terwujudnya kesepakatan nuklir antara Iran, musuh yang menjadi momok



Wanita Palestina yang terdampak gas airmata tengah dievakuasi oleh petugas medis saat terjadi bentrokan antara pelempar-batu Palestina dengan polisi Israel di lapangan al Haram asy-Syarif atau Bait Allah di Kota Tua Yerusalem, Selasa (15/9).

Kelompok ultranasionalis Yahudi sudah lama ingin “menggusur” Masjid Al-Aqsa dengan dalih masjid itu didirikan di atas bekas Kuil Sulaiman. Mereka ingin membangun lagi kuil itu di kompleks Masjid Al-Aqsa. Otoritas Israel juga telah beberapa lama melakukan “penggalian arkeologis” di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa, yang berisiko terhadap kelangsungan keberadaan masjid itu.

Sejak merebut Yerusalem dalam perang 1967, otoritas Israel melarang warga Yahudi berdoa di teras Masjid Al-Aqsa, yang terletak di atas Tembok Barat atau Tembok Ratapan (Wailing Wall), tempat suci umat Yahudi. Namun, kelompok ultranasionalis Yahudi justru mengadvokasi warga Yahudi agar berdoa di teras masjid. Mereka menuntut akses yang lebih luas ke kompleks Masjid Al-Aqsa.

Warga Muslim Palestina mencurigai, Israel sedang berusaha mengubah peraturan di tempat suci itu. Oleh polisi Israel, orang Yahudi diperbolehkan mengunjungi tempat suci di teras Masjid Al-Aqsa pada waktu-waktu tertentu. Namun mereka dilarang berdoa di sana karena berpotensi memicu ketegangan dengan warga Muslim Palestina. Warga Palestina merasa was-was, bahwa umat Yahudi secara bertahap akan semakin diberi akses meluas ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Para pemuda Palestina berusaha mencegah hal itu.

Ancaman Langkah Represif

Datangnya lebih dari seribu turis dan umat Yahudi untuk merayakan Tahun Baru Yahudi (Rosh Hashanah), yang dimulai sejak 13 September 2015, semakin membuat khawatir warga Palestina dan otoritas Muslim. Mereka khawatir, Israel akan menghapus peraturan akses dan pengelolaan yang berlaku saat ini, dan menggantinya dengan peraturan baru yang memungkinkan

pembagian penggunaan tempat suci itu. Warga Yahudi diberi kesempatan mengunjungi saat pagi hari, dan Muslim pada waktu sesudahnya.

Untuk meredam perlawanan Palestina, seperti biasa PM Netanyahu langsung mengancam dengan langkah-langkah represif. Dalam awal rapat darurat dengan para menteri dan aparat keamanan, Netanyahu mengatakan, akan ada “denda yang signifikan” bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran, dengan terlibat pada aksi protes anti-Israel, dan bagi orangtua anak itu. Sudah diputuskan untuk melakukan langkah-langkah keras, dan dibahas perubahan sejumlah peraturan, termasuk hukuman minimum bagi yang melempar batu.

Netanyahu menegaskan, ia tidak akan membiarkan para pembuat keonaran mengganggu orang Yahudi lagi. Namun ditambahkannya bahwa status quo di Masjid Al-Aqsa harus dijaga. Umat Islam dapat mengunjunginya ketika mereka mau menggunakan tempat ibadah itu. “Israel bertekad mempertahankan status quo di tempat itu,” ujarnya.

Netanyahu mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa pada 16 September 2015. Kunjungan berlangsung ketika tentara dan pemukim Israel menyerang Muslim yang berada di dalam kompleks masjid. Bentrokan hari keempat tak terhindarkan. Kedatangan Netanyahu mengakibatkan bentrokan lebih keras.

Enam warga Palestina diculik tentara Israel, beberapa jam sebelum kunjungan Netanyahu. Selama kunjungan, Netanyahu mengatakan, Israel berencana memperluas mandat pasukan, menyusul bentrokan dengan warga Palestina di sekitar Masjid Al-Aqsa.

Di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mendesak PBB bertindak untuk menghentikan agresi Israel di Masjid Al-Aqsa. Desakan itu ditanggapi Nikolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk Proses Perdamaian di Timur Tengah, yang menyatakan keprihatinan serius atas kekerasan di Masjid Al-Aqsa. © Satrio Arismunandar

bagi Israel, dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lain di Eropa. Israel mengklaim, kesepakatan nuklir itu akan memperkuat posisi Iran di Timur Tengah dan mengancam keamanan Israel. Usaha Israel untuk memanfaatkan kubu Partai Republik di Kongres Amerika, untuk membatalkan kesepakatan nuklir itu, juga kandas.

Mau Menggusur Masjid Al-Aqsa

Dengan latar belakang seperti itulah, terjadi serangkaian bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Bentrokan ini hanyalah salah satu letupan dari masalah yang lebih krusial dan secara serius mengancam keberadaan Masjid Al-Aqsa, sebagai tempat suci umat Islam. Israel membagi-bagi kompleks Al-Aqsa dalam beberapa wilayah. Sebagian lokasi itu untuk Muslim dan sebagian lain untuk Yahudi. Muslim menyebut kompleks Masjid Al-Aqsa itu sebagai Baitul Maqdis, sedangkan umat Yahudi menyebutnya sebagai Temple Mount.

Abbott, Turnbull dan Islamofobia di Australia

Perdana Menteri Australia yang baru, Malcom Turnbull, diharapkan lebih progresif dan ramah terhadap komunitas Muslim Australia. Salah satu batu ujiannya adalah melawan rasisme dan Islamofobia di Australia.

Bagi komunitas Muslim di Australia, tidak ada yang perlu ditangani dari kekalahan Tony Abbott dalam pertarungan kekuasaan di dalam Partai Liberal yang berkuasa, yang akhirnya menggeser Abbott dan menaikkan Malcolm Turnbull ke posisi Perdana Menteri. Selama dua tahun di bawah Abbott sebagai PM Australia, komunitas Muslim merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka rasakan sebagai meningkatnya Islamofobia di Australia.

Menteri Komunikasi Malcolm Turnbull terpilih memimpin Partai Liberal menggantikan Abbott pada 14 September 2015, dengan perbandingan suara 54 lawan 44. Dalam pertarungan politik itu, Julie Bishop yang semula menjabat Menteri Luar Negeri di kabinet Abbott terpilih menjadi Wakil Perdana Menteri Australia.

Turnbull, yang mantan bankir, terpilih menjadi PM Australia ke-29. Berbeda dengan Abbott yang konservatif, Turnbull dipandang sebagai sosok yang lebih revolusioner. Ia mendukung pernikahan sejenis dan berniat menggantikan sistem kepemimpinan monarki Inggris di Australia dengan Presiden Australia.

Dalam konteks Islam, Abbott sering dikritik oleh para tokoh Muslim karena komentar-komentarnya terhadap Islam. Dalam pidatonya tentang keamanan nasional pada Februari 2015, Abbott, misalnya, mengatakan bahwa komunitas Muslim belum berbuat cukup banyak untuk memerangi penyebaran ekstremisme Islam.



Malcolm Turnbull (kiri) berbicara kepada media bersama Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop setelah pemungutan suara internal partai yang melengserkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Rumah Parlemen di Canberra, Senin (14/9).

Muslim Jadi Kambing Hitam

"Saya sering mendengar para pemimpin Barat menjabarkan Islam sebagai sebuah agama yang damai. Saya berharap lebih banyak pemimpin Muslim mengatakan hal itu dengan lebih sering dan betul-betul serius dengan pernyataannya itu," kata Abbott saat itu. Komentar Abbott ini jelas kurang mengenakkan bagi tokoh-tokoh Islam di Australia. Salah satu organisasi Muslim internasional menuduh Abbott menggunakan Muslim Australia sebagai kambing hitam untuk menaikkan popularitasnya.

Juru bicara Dewan Islam Victoria, Kuranda Seyit, pada 16 September 2015 mengatakan, Abbott tidak pernah secara terbuka menentang Islamofobia. "Dia justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok rasis di bawah bendera kebebasan berbicara," ujar Seyit.

Menurut Seyit, Abbott berfokus pada keamanan nasional sebagai salah satu proyek besar. Namun, hal tersebut seharusnya tidak mengorbankan komunitas Muslim. Ia berharap, Malcolm Turnbull bisa bersikap lebih baik, meski mungkin hal itu tidak terjadi dalam waktu cepat.

Seyit menyatakan, walaupun organisasinya menyambut baik kenaikan Turnbull menjadi PM Australia sebagai "awal yang segar,"

titik ujian bagi pemimpin Liberal yang baru itu adalah bagaimana ia menanggapi rasisme dan Islamofobia di Australia. "Kami mengantisipasi bahwa ia akan mengecam keras aktivitas rasis dan mengirim pesan pada Australia bahwa sikap fanatik, tidak toleran, dan prasangka, tak punya tempat di masyarakat kita."

Mampu Memulihkan Hubungan

Para tokoh Muslim Australia optimistis, Turnbull akan mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, untuk memerangi Islamofobia di negeri itu. Jamal Rifi, intelektual Muslim berpengaruh di Sydney, mengatakan, Turnbull akan mampu memulihkan hubungan antara Muslim dan masyarakat besar Australia, yang dirusak oleh pemerintah Abbott. "Turnbull melihat Muslim Australia sebagai mitra, ketika menangani masalah radikalisme. Turnbull juga melihat Muslim Australia bukan sebagai ancaman, tapi garis pertahanan pertama," ujar Rifi.

Sedangkan Silma Ihram dari Asosiasi Perempuan Muslim Australia mengatakan, hubungan pemerintah Abbott dengan organisasi Muslim tidak terlalu banyak. Ia berharap, Turnbull akan lebih baik dari Abbott karena berbeda dari sisi kecerdasan dan kemampuan berbicara pada banyak orang. Ihram mengaku telah menyusun surat untuk Turnbull, dan memintanya sebagai PM Australia yang baru untuk meninjau kembali undang-undang antiterorisme, yang dirasa merugikan warga Muslim. *Satrio Arismunandar*

Beruang Merah Turun Gunung di Suriah

Merasa Presiden Suriah Bashar Assad terancam jatuh, Rusia akhirnya mengerahkan militernya untuk mendukung Assad, sekaligus mengamankan batu pijakan Rusia sendiri di Timur Tengah.

Angin perang bertiup makin kencang di Timur Tengah, setelah Rusia—sekutu lama Suriah sejak zaman Uni Soviet—mengirimkan bantuan militer komplit. Keterlibatan aktif militer Rusia ini semakin memperumit konflik dan perang saudara di Suriah, yang sudah memakan korban sekitar 300 ribu jiwa dan menyebabkan arus ratusan jutaan pengungsi ke negara-negara tetangga dan Eropa.

Awalnya, kehadiran Rusia disebutkan hanya berupa bantuan kemanusiaan, penasihat militer, sejumlah tank T-90 dan kendaraan lapis baja BTR-82A, artileri, rudal, dan sedikit pesawat tempur. Namun dua pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengatakan, Rusia terus menambah jumlah jet tempur mereka di Suriah. Sejauh ini, Rusia setidaknya sudah mengerahkan 28 pesawat tempur dan pembom.

Pesawat-pesawat itu ditempatkan di sebuah lapangan udara di provinsi Latakia, bagian Barat Suriah, kata sumber yang dilansir Times of Israel, 22 September 2015. Jenis pesawat yang ditempatkan di pangkalan udara itu adalah Sukhoi Su-24 dan Su-25, dan ada juga beberapa pesawat jenis Su-27 Flanker.

Helikopter Pengangkut dan Tempur

Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) yang berbasis di Inggris menyatakan, Rusia tengah membangun landasan udara. Diduga, pengembangan kapasitas bandar udara Hamdiyah di Tartus, basis Assad di Latakia selatan, terkait dengan penguatan fasilitas Angkatan Laut Rusia di Pelabuhan Tartus.

Sumber lain di pemerintah Rusia mengungkapkan, Rusia telah



mengirimkan tentara ke Suriah, dan jumlah yang sudah dikirim hampir 2.000 orang. Mereka terdiri dari tentara, pilot jet tempur, penasihat militer, dan beberapa insinyur militer. Rusia juga telah mengirimkan helikopter pengangkut atau tempur. Menurut pejabat AS, setidaknya ada 20 helikopter Rusia yang berada di Suriah, dan ditempatkan di pangkalan yang sama dengan 28 jet tempur.

Alasan resmi Rusia untuk semua kehadiran militer ini adalah mendukung pemerintah Suriah yang sah di bawah Presiden Bashar Assad, dalam melawan terorisme. Seperti, kelompok ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah), yang kini telah menguasai sebagian besar wilayah Suriah. Peralatan militer yang dipasok juga dikatakan sebagai bagian dari kesepakatan penjualan yang sudah lama ada.

Selain ISIS, ada sejumlah kelompok oposisi lokal yang juga berperang melawan militer Suriah. Target mereka adalah menumbangkan Assad dari kekuasaan. Kelompok oposisi ini didukung oleh Amerika dan Barat, Turki, dan Arab Saudi. Sedangkan pemerintah Suriah didukung oleh Iran dan kelompok Hizbullah Lebanon. Meski kubu oposisi mendapat pasokan dana dan persenjataan, sejauh ini mereka belum berhasil menumbangkan Assad. Perang pun jadi berlarut-larut selama 4,5 tahun,

dengan korban yang terus berjatuhan.

Presiden Assad Terpojok

Meski masih bertahan, Assad dalam posisi lemah dan terpojok. Hal ini memaksa Rusia untuk turun tangan langsung. Suriah adalah batu pijakan satu-satunya yang tersisa bagi militer Rusia di Timur Tengah, dan batu pijakan itu terancam lenyap jika Assad sampai terguling.

Langkah Rusia ini memberi komplikasi baru pada rencana AS dan sejumlah negara tetangga Suriah untuk menggusur Assad. Menteri Luar negeri AS John Kerry meminta Assad untuk mundur, meski kapan persisnya Assad mundur itu bisa diputuskan melalui negosiasi. Kerry meminta Rusia dan Iran untuk menggunakan pengaruh mereka pada Assad, untuk meyakinkannya agar mau melakukan negosiasi transaksi politik.

Sedangkan dalam sudut pandang Rusia, Damascus harus menjadi bagian dari upaya internasional dalam memerangi ISIS. Maka Rusia mencoba menggalang tiga negara Arab—Mesir, Jordania, dan Uni Emirat Arab—untuk membangun kerjasama dengan Assad dalam perang melawan teroris, khususnya ISIS. Soal dipertahankannya Assad inilah yang terus menjadi titik sengketa antara Rusia dan AS. ◦

Satrio Arismunandar

Senandung Debu



Grup musik bernuansa Islami, Mustafa Debu, pertama kali muncul di tahun 2001 dengan beranggotakan 12 personel. Masing-masing anggota terdiri dari enam Muslim dan sisanya Muslimah. Sebagian besar anggota Debu berasal dari negara Amerika Serikat. Namun juga ada anggota yang berasal dari Swedia, Inggris, dan terakhir dari Indonesia.

Pada awalnya Debu lahir di Amerika Serikat di bawah bimbingan Syekh Fattaah, pendiri Debu sekaligus guru tasawwuf band tersebut. Saat berada di Negeri Paman Sam, nama kelompok pertama musik mereka yaitu, 'Dust on the Road' (atau berarti Debu di Jalanan).

Kemudian, mereka mencoba hijrah ke Indonesia pada tahun 1999 silam, setelah di Indonesia mereka mengubah nama mereka menjadi Debu dengan beberapa perubahan

formasi. Pada tahun 2003 mereka mengeluarkan album untuk pertama kalinya yang berjudul 'Mabuk Cinta' yang dirilis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Album perdana ini berisi 10 lagu termasuk single pertama, "Cinta Saja".

Berbicara soal musik Debu, Kumayl Mustafa Daood selaku vokalis mengisahkan tentang perjalanan kariernya saat ia mengenal dunia musik.

"Pertama kali mengenal musik dasarnya dari orang tua. Dulu saya tidak dibolehkan mendengar musik pop. Saya hanya harus mendengar lagu ber-genre musik Arab dan Turki. Maka dari itu awal Debu dibentuk juga bergenre seperti itu," bebernya kepada Aktual, baru-baru ini, di Bandung, Jawa Barat.

Mengingat, Debu sudah berkarya sekaligus menetap di Tanah Air selama lebih 16 tahun, Mustafa

memberikan pesan bagaimana agar bisa sukses di blantika musik.

"Sebenarnya kiat sukses di dunia musik itu yang pertama harus jadi diri sendiri dulu. Dalam artian bukan ngotot harus beda, karena sering saya temui itu adalah orang ngotot ingin beda dari yang lain bukan untuk jadi



serta bernyanyi dalam sehari 4-6 jam selama kurun waktu enam tahun. Selama waktu tersebut, dirinya mendalami dunia musik. Hingga akhirnya, ia menganggap bahwa musik merupakan "jembatan terbaik" dalam syiar Islam.

"Kenapa jembatan terbaik, karena musik bisa menggugah hati manusia, sangat luar biasa pengaruhnya. Beda jika menyampaikan sebuah pesan untuk menggugah hati manusia selain lewat musik, melalui ceramah mungkin baru tersentuh dengan ribuan ceramah, tapi dengan satu musik saja sudah bisa menyentuh hati manusia," urainya menerangkan.

Sementara itu, Hadi Subakat pengusaha sekaligus pendiri dari perusahaan kosmetik Muslimah Wardah- salah satu penggemar musik Debu- begitu mencintai grup musik Islami tersebut. Menurutnya, lirik dan syair Debu begitu menginspirasi di dalam kehidupannya sehari-hari.

"Saya pikir musiknya memang baik sekali ya. Memang isi dari musik itu, liriknya juga bagus, tentu ada perubahannya itu sudah pasti. Saya cinta Debu sudah dari sejak awal dari album pertamanya. Salah satu grup yang saya gemari, favoritnya 'brother' Mustafa aja. Pengertiannya tentang kehidupan, tentang keagamaan saya rasakan cukup mengesankan," terangnya menambahkan.

Beberapa hari yang lalu, untuk pertama kalinya Debu menggelar kembali konser mini yang bertajuk 'Mustafa Debu Soul Session', di Hotel Crowne Plaza, Bandung, dalam rangka 'Milad' kota Bandung yang ke-205.

Debu kembali tampil dengan nuansa berbeda. Kali ini, Mustafa memboyong grup alat musik terkenal yaitu, Bandung Saung Angklung Udjo. Debu berkolaborasi dengan musik Angklung khas Bandung tersebut.

Yang berbeda dari konsernya kali ini yakni, selain menyanyikan beberapa lagu, Debu juga sedikit 'sharing' mengenai perjalanan hidup mereka yang penuh dengan lika-liku dan berkah dalam sejarah kariernya. ◦

Vina Fatma dan Ferro Maulana



diri sendiri ingin berbeda saja dari orang lain, yang ada malah jadi aneh dan memaksakan," paparnya sambil tersenyum.

Di kesempatan yang sama, Mustafa mengungkapkan terkait suka dukanya terjun menekuni musik Islam.

"Sebenarnya saya ini bukan orang musik. Saya itu disuruh orang tua dari kecil buat belajar musik, dari kecil itu udah disuruh tampil ke acara sana-sini," jelasnya menambahkan sembari mengajarkan Aktual bermain gitar.

Dan, lanjutnya, ia berlatih musik

Sepanjang 2014, Terjadi 472 Konflik Agraria di Indonesia

Sepanjang tahun 2014, tercatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia. Dengan luasan konflik mencapai 2.860.977 hektar dan melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga.

Disampaikan aktifis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Mazaya Latifasari, berbagai dampak langsung bisa dirasakan rakyat akibat konflik agraria tersebut.

Antara lain berupa pengusuran dan perampasan tanah baik di kota maupun desa, berkurangnya sumber-sumber pangan dan ekonomi rakyat karena alih fungsi hutan dan lahan pertanian. “Dan kerusakan ekologis hulu-hilir,” ujar dia dalam siaran pers yang diterima Aktual.com, Senin (28/9).

Dampak lainnya, sambung dia, derasnya arus mobilitas rakyat ke kota-kota besar di Indonesia, migrasi ke negara-negara pasar kerja, dan melanggengkan politik upah murah.

“Inilah yang juga menyebabkan tuntutan-tuntutan kenaikan upah dan jaminan pekerjaan yang disuarakan kaum buruh dan golongan pemuda-mahasiswa-pelajar laksana menggantang asap,” ujar dia.

/M Vidia Wirawan



Hasyim Muzadi Serukan NU Kembali ke Khittah 1926

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menyerukan organisasi kaum nahdliyin untuk kembali ke khittah NU demi menyelamatkan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

“Memperjuangkan khittah NU saat ini lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena banyaknya persoalan yang kompleks,” kata Hasyim dalam acara halaqah atau pertemuan NU, di Pondok Pesantren Ashidiq Putera Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (27/9).

Acara halaqah dengan tema “Meneguhkan Kembali Semangat Khittah NU 1926” tersebut dihadiri juga oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Salahuddin Wahid, Pengasuh Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo KH Ach Azaim Ibrahimy, Dr Mohammad Adnan dari PWNU Jawa Tengah, KH Ali Syekh Ali Akbar Marbun dari Medan, dan beberapa ulama NU se-Keresidenan Besuki.

“Saat ini persoalannya sangat kompleks dan multidimensi, sedangkan dulu hanya masalah internal saja, sehingga perlu semua pihak untuk kembali meneguhkan khittah NU,” ucap Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang itu.

Sementara penyelenggara halaqah NU di Jember, Afton Ilman Huda

mengatakan pertemuan di Pesantren Ashiddiq Putera Jember merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Pesantren Tebu Ireng Jombang, kemudian dilanjutkan di Pesantren Syaicona Cholil Bangkalan.

“Dari Madura, kemudian halaqah dilanjutkan ke Ponpes Salafiah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, hari ini di Pesantren Ashidiq Jember, serta pada Rabu (30/9) rencananya digelar di Ponpes Cipasung Tasikmalaya,” tuturnya.

Menurutnya, wasiat almarhum KH Abdul Muchit Muzadi dan isyarat para kiai khos dengan pendekatan spiritual dibutuhkan upaya untuk meneguhkan semangat khittah NU 1926.

“Dengan meneguhkan kembali khittah NU, hal itu memberikan peluang bagi NU dan pada garis perjuangan sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, perlu dibangun suatu jembatan politik kultural sebagai ikhtiar yang dapat diterima semua pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah besar NU.

“Organisasi NU jangan dijadikan jembatan untuk kepentingan sesaat, namun NU harus menjadi tujuan utama untuk kemaslahatan umat,” ucap pria yang akrab disapa Gus Afton itu. /Nebby-Ant

300 Hektare Hutan Rinjani Rusak Dirambah



Kepala Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat Andi Pramaria, mengungkapkan sebanyak 300 hektare hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, dalam kondisi rusak parah akibat perambahan hutan.

“Lokasi terparah ini berada di Kabupaten Lombok Timur,” kata Andi Pramaria di Mataram, Senin (21/9).

Dia menuturkan hutan yang telah dirambah tersebut, dijadikan ladang dan kebun oleh warga sekitar terutama yang mendiami seputar kawasan hutan, sedangkan kayu hasil perambahan hutan tidak lantas dijual ke pihak lain, melainkan dipakai sendiri untuk membuat rumah dan pembatas wilayah ladang.

“Jadi kayunya ini tidak di ambil, melainkan dipakai untuk membuat rumah dan pagar batas antar kebun,” ujarnya.

Menurut dia, perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sudah lama terjadi, pelakunya tidak lain masyarakat yang mendiami kawasan hutan, karena mereka menganggap jika lahan tersebut merupakan tanah adat milik mereka.

Untuk mengatasi perambahan hutan tersebut, diakui Andi cukup sulit, dikarenakan menyangkut persoalan sosial dan mata pencarian masyarakat yang menggantungkan

dari hasil berladang.

“Sebetulnya kami sudah menurunkan tim untuk mencoba meninjak, tetapi rupanya tidak ada dukungan dari aparat keamanan, sudah datang kesana tetapi mereka akhirnya menarik diri, sehingga ketika akan mengambil tindakan dibatalkan. Akhirnya tinggal polisi hutan dan masyarakat yang berhadapan,” jelasnya.

Andi menambahkan, selain masyarakat seputar hutan, ada oknum tertentu yang juga diduga terlibat dalam aktivitas perambahan hutan di kawasan TNGR, yakni Kepala Desa dan Kepala Dusun.

“Kita melihat ada bekingnya, dugaan yakni kepala desa dan kadus. Kalau perusahaan yang terlibat pasti gampang menangkapnya,” ucap Andi.

Saat ini, kata Andi, ada sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan TNGR tersebut. Kebanyakan dari mereka menggantungkan hidup dari hasil hutan. Meski demikian, Andi menolak jika dikatakan rusaknya kawasan hutan Gunung Rinjani karena pemerintah dan aparat kecolongan mengatasi hal itu.

“Ini karena tidak ada keberanian saja, pada saat mereka ingin masuk ke dalam kawasan mestinya bisa dicegah, tetapi ini tidak,” katanya.

/Zaenal Arifin-Ant



Anggaran Kuker ke Eropa Rp2,3 Miliar, Ganjar Menuai Kritik

Kepergian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selama 13 hari bersama isteri Siti Atiqoh Pranowo dengan dalih kunjungan kerja ke tiga negara, Suriname, Belanda dan Jerman, menuai kritik pedas.

Perjalanan Ganjar bersama sejumlah SKPD terkait dan Ketua DPRD Jawa Tengah itu dianggap tidak tepat dilakukan di tengah krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia saat ini. Dimana jumlah anggaran untuk kuker sejak 27 September hingga 9 Oktober 2015 itu sebesar Rp2,3 miliar.

“Padahal warga Jateng saat ini banyak mengalami kesulitan mencari makan, tapi malah ada jatah anggaran digunakan untuk kunjungan,” kata Ronny Maryanto, dari Divisi Korupsi, Politik dan Anggaran Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Senin (28/9).

Kuker itu pun dianggap tak mencerminkan perilaku pejabat yang efisien dan efektif dalam memakai uang rakyat. Melengkapi kritiknya, KP2KKN juga menyertakan data Badan Pusat Statistik (BPS). Yang menunjukkan jumlah penduduk miskin Jateng bertambah 15.210 orang tahun ini. Tercatat, September 2014 penduduk miskin sebanyak 4,562 juta orang, justru tahun ini bertambah menjadi 4,577 juta orang.

“Apalagi Ganjar juga mesti merealisasikan janji-janji kampanyenya. Bukan malah ‘bedol desa’ mengajak puluhan pejabat ke luar negeri,” beber dia. /M Vidia Wirawan

Berusaha Bahagia di Tengah Krisis

Satrio Arismunandar

Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa merasa bahagia, ketika secara faktual kita hidup di tengah krisis ekonomi? Bagaimana kiat untuk merasa bahagia, meski harga kebutuhan pokok terus naik, sementara nilai rupiah dan taraf kehidupan rasanya justru merosot?

Saya tidak berpretensi untuk memberi rumus kebahagiaan. Namun, saya ingin menyitir sebuah kisah, yang pernah saya baca di majalah anak-anak “Si Kuncung,” ketika saya masih siswa di Sekolah Dasar. Begini kisahnya:

Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan itu cukup aman, damai, dan makmur. Sang raja berusaha memerintah negerinya dengan adil. Ia juga memiliki permaisuri yang cantik, dan juga memiliki dua orang anak yang lucu-lucu.

Namun, meski sudah hidup berkecukupan, sang raja selalu mengeluh. Ia merasa lelah mengurus kerajaan. Tetapi rakyat sepertinya tidak tahu terimakasih dan tidak selalu mudah diatur. Ada saja masalah yang timbul, meski raja sudah berusaha bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Singkatnya, raja merasa tidak bahagia.

Akhirnya, sang raja memanggil salah seorang menterinya. Menteri itu diberi sebuah tugas khusus, yaitu mencari satu orang warga kerajaan yang betul-betul 100 persen merasa bahagia. Jika orang itu sudah diketemukan, si menteri disuruh membeli baju orang itu, berapapun harganya. Sang raja ingin mengenakan baju orang yang bahagia itu, supaya ia ikut tertular merasakan kebahagiaan.

Maka si menteri pun melakukan perjalanan jauh ke seantero kerajaan, untuk menemukan orang yang 100 persen bahagia. Namun, mencari orang yang betul-betul 100 persen bahagia, ternyata tidak mudah. Sudah hampir setahun si menteri berkelana ke seluruh penjuru kerajaan, tetapi belum juga berhasil bertemu seseorang yang betul-betul 100 persen merasa bahagia.

Ada beberapa orang yang merasa hidupnya cukup senang, tetapi selalu ada saja kekurangannya. “Ya, kehidupan saya lumayan baik, tetapi....” Begitulah. Selalu

ada satu dan lain alasan, yang membuat seseorang tidak pernah 100 persen bahagia. Entah karena kurang harta, belum bertemu jodoh, belum naik pangkat, dan sebagainya.

Si menteri nyaris putus asa. Nah, di ujung keputusan itu, sampailah dia di pinggir pantai dan melihat sebuah gubuk kecil dan kumuh. Waktu itu, sudah agak malam. Si menteri mendengar, suara laki-laki di dalam gubuk itu berkata; “Wah, semua pekerjaanku hari ini sudah selesai. Tidak ada lagi beban. Sekarang tinggal tidur dan beristirahat. Aduuh, betapa bahagianya diriku!”

Mendengar ucapan itu, hati si menteri tersentak. “Ini dia yang kukari selama ini,” pikirnya. “Orang yang betul-betul 100 persen merasa bahagia, tanpa syarat atau keluhan apapun.”

Si menteri pun mengetuk pintu gubuk itu, dan bertemu dengan orang bersangkutan. Dia bertanya, “Kawan, saya dengar tadi kau bilang bahwa kau sangat bahagia. Benarkah kau sepenuhnya 100 persen merasa bahagia? Tidak ada keluhan atau ganjalan sedikit pun?”

“Betul sekali. Aku sepenuhnya 100 persen merasa bahagia. Tidak ada keluhan atau ganjalan sedikit pun. Memangnya kenapa?” kata pria yang tinggal di gubuk itu.

Si menteri pun menjelaskan tugas yang diembannya dari sang raja. “Jadi, sekarang aku ingin membeli bajumu. Berapa pun harga yang kau sebutkan, tak usah khawatir, pasti aku akan membayarnya!” kata si menteri.

Mendengar ucapan menteri itu, wajah si penghuni gubuk malah berubah sedih. Ia menjawab: “Aduh, sayang sekali, kawan. Aku sebenarnya sangat ingin membantumu dan membahagiakan raja kita. Tetapi masalahnya, aku tidak punya baju satu potong pun!”

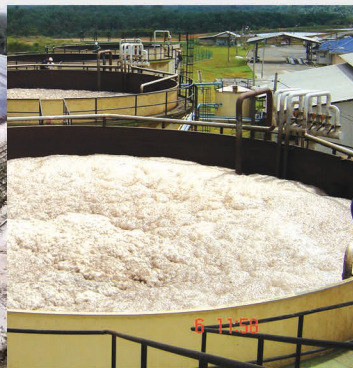
Lantas apa hikmah dari kisah ini? Kebahagiaan itu sebenarnya lebih disebabkan oleh faktor internal dari dalam hatimu sendiri, ketimbang faktor eksternal. Kebahagiaan itu harus dicari di dalam, bukan dari hal-hal eksternal. Kita mungkin tak bisa menghindari dari krisis ekonomi, bencana alam, dan lain-lain, tapi insyaAllah kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh hal-hal itu. ◉

Semua orang ingin hidup bahagia. Tetapi kita hidup di dunia dalam konteks ruang, waktu, dan situasi tertentu. Dan konteks itu adalah kita ingin bahagia sebagai warga negara Indonesia di tahun 2015, ketika kondisi sosial-ekonomi sedang terpuruk.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



www.ebtke.esdm.go.id



Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)

DIREKTORAT BIOENERGI

Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng Jakarta Pusat 10320

☎ 021-39830077 ☎ 021-31901087 ✉ info@ebtke.esdm.go.id



PRIMA LAYAKNYA PELARI MARATHON

Seperti halnya seorang pelari marathon.
Untuk kuat berlari menempuh jarak yang panjang,
dibutuhkan stamina yang kuat dan sehat.
Tidak hanya sekedar berlari, tetapi juga harus berstrategi
agar berhasil mencapai garis finish sebagai pemenang.

Demikian halnya dengan Bank Bukopin.
Di usia 45 tahun, kami terus berupaya
meningkatkan kinerja kami agar semakin prima
untuk memberikan yang terbaik.
Pengalaman dari waktu ke waktu merupakan
tempaan bagi kami untuk bisa memenangkan kompetisi.

Kami siap berlari untuk mewujudkan Visi dan Misi kami
menjadikan Bank Bukopin sebagai lembaga keuangan
yang terkemuka dalam pelayanan jasa keuangan
yang terintegrasi.